KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Telepon (0361) 701954, 701797, 701812
Laman : www.unud.ac.id

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

Kontrak Harga Satuan

PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pembangunan Catus Pata Universitas Udayana

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
KONSTRUKSI
UNIVERSITAS UDAYANA

Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali

DENGAN

PT. MEGATAMA KARYA

ALAMAT : Jl. Sekar Jepun VI No. Denpasar
NOMOR : 03.III /UN14.8/PL/SPK/Kons/2026
028/MK.Catus Pata-SPK/IV/2026
TANGGAL : 28 April 2026
NILAI : Rp. 15.928.500.000,00 (LIMA BELAS MILYAR SEMBILAN RATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)

TAHUN ANGGARAN 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Telepon (0361) 701954, 701797, 701812
Laman : www.unud.ac.id

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

Kontrak Harga Satuan

Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi

Pembangunan Catus Pata Universitas Udayana

Nomor :
03.III/UN14.8/PL/SPK/KONS/2026
028/MK.Catus Pata-SPK/IV/2026

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak " dibuat dan ditandatangani di badung, pada Selasa, tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 03.III/UN14.8/PL/BAHP/KONS/2026 tanggal 21 April 2026, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 03.III/UN14.8/PL/Kons/SPPBJ/2026 tanggal 22 April 2026, antara:

Nama	:	LIE JASA
NIP	:	19661218 199103 1 003
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konstruksi
Berkedudukan di	:	Kampus UNUD Bukit Jimbaran Badung - Bali

yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Universitas Udayana berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Udayana Nomor : 1/UN14/HK/2026, Tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Universitas Udayana, Tanggal 2 Januari 2026 selanjutnya disebut "Pengguna Jasa ", dengan:

Nama	: Ida Bagus Wayan Mega Antara, ST.
Jabatan	: Direktur
Berkedudukan di	: Jl. Sekar Jepun VI No. 2 Denpasar
Akta Pendirian Notaris	
Nomor	: 3
Tanggal	: 5 Juni 2004
Notaris	: K. Rames Iswara, SH.

Akta Perubahan Notaris

Akta Perubahan Notaris

Nomor : 10

Tanggal : 24 Juli 2024

Notaris : Putu Ayu Mas Ratih, SH., M.Kn.

yang bertindak untuk dan atas nama PT. MEGATAMA KARYA

selanjutnya disebut **"Penyedia"**.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2026 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas Udayana.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Catus Pata Universitas Udayana sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **"Pekerjaan Konstruksi"**;
c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
    1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
    2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
    3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;



4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Catus Pata Universitas Udayana dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

A. Pekerjaan Persiapan dan SMKK
B. Pekerjaan Bangunan Catus Pata
C. Pekerjaan Pedestrian
D. Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (DPT)
E. Pekerjaan Plaza
F. Pekerjaan MEP Area Catus Pata

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 15.928.500.000,00 (LIMA BELAS MILYAR SEMBILAN RATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)** dengan kode akun kegiatan/MAK : 7730.CBJ.001.051.C.537113;
2) Kontrak ini dibiayai dari DIPA BLU UNUD Tahun 2026 Nomor : SP DIPA-139.03.2.693389/2026, tanggal 01 Desember 2025 ;
3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Renon rekening nomor : 0100100023931 atas nama Penyedia : **PT. MEGATAMA KARYA.**

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampiranya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar- gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

a. adendum Kontrak (apabila ada);
b. Surat Perjanjian;
c. Surat Penawaran;
d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
f. spesifikasi teknis dan gambar;
g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);

Pasal 5

MASA KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **240 (Dua Ratus Empat Puluh)** hari kalender;

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **365 (tiga ratus enam puluh lima)** hari kalender.



Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. MEGATAMA KARYA



IDA BAGUS WAYAN MEGA ANTARA, ST
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konstruksi
Universitas Udayana



LIE JASA
NIP. 19661218 199103 1 003

Paraf

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Telepon (0361) 701954, 701797, 701812
Laman : www.unud.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor : 03.III/UN14.8/PL/SPMK/Kons/2026
Paket Pekerjaan :

Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Catus Pata Universitas Udayana

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LIE JASA**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Konstruksi
Alamat : Jalan Kampus Bukit Jimbaran Badung, Bali
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian nomor : 03.III /UN14.8/PL/SPK/Kons/2026
028/MK.Catus Pata-SPK/IV/2026
tanggal **28 April 2026**, bersama ini memerintahkan:

Nama : PT. MEGATAMA KARYA
Alamat : Jl. Sekar Jepun VI No. 2 Denpasar

yang dalam hal ini diwakili oleh : **Ida Bagus Wayan Mega Antara, ST.**
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan :

   A. Pekerjaan Persiapan dan SMKK
   B. Pekerjaan Bangunan Catus Pata
   C. Pekerjaan Pedestrian
   D. Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (DPT)
   E. Pekerjaan Plaza
   F. Pekerjaan MEP Area Catus Pata

2. Tanggal mulai kerja : **28 April 2026**;

3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu penyelesaian : selama **240 (Dua Ratus Empat Puluh)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **23 Desember 2026.**

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari sisa pekerjaan sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Jimbaran, 28 April 2026
Untuk dan atas nama Universitas Udayana
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konstruksi

LIE JASA
NIP. 196612181991031003

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
PT. MEGATAMA KARYA

Ida Bagus Wayan Mega Antara, ST.
Direktur

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Telepon (0361) 701954, 701797, 701812
Laman : www.unud.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA LOKASI PEKERJAAN
Nomor : 03.III/UN14.8/BA-STLP/2026

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** kami yang bertanda-tangan dibawah ini :

1. Nama : **Dr. Ir. Lie Jasa, MT**
   Jabatan: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konstruksi Universitas Udayana Tahun Anggaran 2026
   Alamat : Gedung Rektorat Lantai II, Kampus Unud Bukit Jimbaran, Badung Bali.
   Selanjutnya disebut sebagai, **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**

2. Nama : **Ida Bagus Wayan Mega Antara, ST.**
   Jabatan: Direktur PT. MEGATAMA KARYA
   Alamat : Jl. Sekar Jepun VI No. 2 Denpasar
   Selanjutnya disebut sebagai, **Penyedia**

Sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi nomor :
03.III/UN14.8/PL/SPK/Kons/2026
028/MK.Catus Pata-SPK/IV/2026, tanggal 28 April 2026 dengan ini menyatakan :

1. Telah melakukan serah terima lokasi Pekerjaan dari **PPK** kepada **PENYEDIA** untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan **Pembangunan Catus Pata Universitas Udayana** Tahun Anggaran 2026.
2. Semenjak serah terima ini dilakukan, maka seluruh tanggung jawab yang disebutkan didalam Dokumen Kontrak menjadi kewajiban **PENYEDIA** sampai dilakukan Serah Terima Kembali Pekerjaan dari **PENYEDIA** kepada **PPK**.
3. **PENYEDIA** wajib menjaga ketertiban, keamanan dan mengutamakan kepentingan/kelancaran umum selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung.

Demikuan Berita Acara Serah Terima Lokasi pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA **PT. MEGATAMA KARYA**	PPK Konstruksi Universitas Udayana
Ida Bagus Wayan Mega Antara, ST Direktur	**Dr. Ir. Lie Jasa, MT** NIP. 196612181991031003

LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN CATUS PATA UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR SPK : 03.III /UN14.8/PL/SPK/Kons/2026
028/MK.Catus Pata-SPK/IV/2026
TGL KONTRA : 28 APRIL 2026
NILAI KONTR : Rp. 15.928.500.000
LOKASI : KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN, BADUNG, BALI
TAHUN : 2026

REKAP BILL OF QUANTITY

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN DAN SMKK	Rp	249.857.737.37
I	PEKERJAAN BANGUNAN CATUS PATA	Rp	10.549.336.057.83
II	PEKERJAAN PEDESTRIAN	Rp	2.447.562.235.63
III	PEKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH (DPT)	Rp	223.761.633.76
IV	PEKERJAAN PLAZA	Rp	220.534.408.14
V	PEKERJAAN MEP AREA CATUSPATA	Rp	658.947.927.26
	JUMLAH HARGA	**Rp**	**14.350.000.000.00**
	PPN 11%	**Rp**	**1.578.500.000.00**
	TOTAL HARGA	**Rp**	**15.928.500.000.00**
### Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ###		**Rp**	**15.928.500.000.00**

Untuk dan Atas Nama Penyedia
PT. MEGATAMA KARYA

IDA BAGUS WAYAN MEGA ANTARA,ST
Direktur

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Konstruksi Universitas Udayana

LIE JASA
NIP. 19661218 199103 1 003

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN CATUS PATA UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR SPK : 03.III /UN14.8/PL/SPK/Kons/2026
028/MK.Catus Pata-SPK/IV/2026
TGL KONTRAK : 28 APRIL 2026
NILAI KONTRAK : Rp. 15.928.500.000
LOKASI : KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN, BADUNG, BALI
TAHUN : 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN DAN SMKK**					
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**					
1	Pek. Papan Nama Proyek	1.00	bh	1.477.946.00	1.477.946.00	1.477.946.00
2	Pek. Pembersihan dan Pembongkaran	4.000.29	m2	16.718.00	16.718.00	66.876.831.50
3	Pek. Pengukuran dan pas. bouwplank	251.20	m	50.402.00	50.402.00	12.660.982.40
4	Pek. Pagar Proyek	580.00	m1	195.159.00	195.159.00	113.192.220.00
5	Pek. Pemindahan Utilitas (Tiang Listrik, Telpon, Pipa Air)	1.00	Ls	14.359.757.47	14.359.757.47	14.359.757.47
		-	-			
B	**BIAYA PENERAPAN SMKK**	-	-	-	-	-
1	Penyiapan RKK terdiri atas:	-	-	-	-	-
	- Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	1.00	set	1.500.000.00	1.500.000.00	1.500.000.00
2	Sosialisasi, Promosi, dan Pelatihan terdiri atas:	-	-	-	-	-
	- Induksi K3 (Safety Induction); khusus untuk pekerja baru	30.00	or	8.000.00	8.000.00	240.000.00
	- Spanduk (banner) ; (6m2)	1.00	lb	100.000.00	100.000.00	100.000.00
	- Poster; (2m2)	1.00	lb	50.000.00	50.000.00	50.000.00
	- Papan Informasi K3.	1.00	bh	150.000.00	150.000.00	150.000.00
3	Alat Pelindung Diri terdiri atas:	-	-	-	-	-
	- Topi Pelindung (Safety Helmet) ;	30.00	bh	25.000.00	25.000.00	750.000.00
	- Sarung Tangan (Safety Gloves);	30.00	psg	15.000.00	15.000.00	450.000.00
	- Sepatu Keselamatan (Safety Shoes); untuk Staf	30.00	psg	70.000.00	70.000.00	2.100.000.00
	- Rompi Keselamatan (Safety Vest);	30.00	bh	50.000.00	50.000.00	1.500.000.00
4	Asuransi dan perizinan :	-	-	-	-	-
	- Asuransi (Construction All Risk / CAR)	1.00	set	24.000.000.00	24.000.000.00	24.000.000.00
5	Personel Keselamatan Konstruksi terdiri atas :	-	-	-	-	-
	- Petugas K3	6.00	bln	1.500.000.00	1.500.000.00	9.000.000.00
6	Fasilitas Sarana, Prasarana, dan alat Kesehatan;	-	-	-	-	-
	- Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, dll)	1.00	ls	200.000.00	200.000.00	200.000.00
7	Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas diperlukan atau Manajemen Lalu Lintas terdiri atas :	-	-	-	-	-
	- Rambu Petunjuk;	4.00	bh	50.000.00	50.000.00	200.000.00
	- Rambu Peringatan;	4.00	bh	50.000.00	50.000.00	200.000.00
	- Rambu Informasi;	4.00	bh	50.000.00	50.000.00	200.000.00
8	Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko keselamatan konstruksi :	-	-	-	-	-
	- Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 9Kg	1.00	bh	500.000.00	500.000.00	500.000.00
	- Bendera K3;	1.00	bh	150.000.00	150.000.00	150.000.00
		-	-			
II	**PEKERJAAN BANGUNAN CATUS PATA**	-	-	-	-	-
A	**PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1**	-	-	-	-	-
1	Pek. Galian Tanah Keras	135.24	m3	243.800.00	243.800.00	32.970.293.00
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Pile Cap, t = 10 cm	6.29	m3	402.954.00	402.954.00	2.534.580.66
3	Pekerjaan Pile Cap F1	-	-	-	-	-
	a Pek. Rabatan Beton Lantai Kerja, t = 5cm ; f'c 7,5 Mpa	3.15	m3	1.305.649.00	1.305.649.00	4.106.266.11
	b Pek. Beton f'c = 25 Mpa	50.32	m3	1.455.689.00	1.455.689.00	73.250.270.48
	c Pek. Pembesian Tulangan Atas dia. D16 mm - 150	1.737.79	kg	16.331.00	16.331.00	28.379.863.51
	d Pek. Pembesian Tulangan Bawah dia. D16 mm - 150	1.927.03	kg	16.331.00	16.331.00	31.470.341.95
	e Pek. Bekisting Batako	23.10	m2	379.508.00	379.508.00	8.768.152.83
4	Pekerjaan Kolom K1, 40x40	-	-	-	-	-
	a Pek. Beton f'c = 25 Mpa	8.49	m3	1.455.689.00	1.455.689.00	12.353.559.13
	b Pek. Pembesian Pokok dia. D19 mm	2.047.37	kg	16.331.00	16.331.00	33.435.645.20
	c Pek. Pembesian sengkang dia. D13 mm	1.456.65	kg	16.331.00	16.331.00	23.788.558.99
	d Pek. Bekisting	84.86	m2	210.842.00	210.842.00	17.892.895.49
5	Pekerjaan Kolom K2, D80	-	-	-	-	-
	a Pek. Beton f'c = 25 Mpa	7.99	m3	1.455.689.00	1.455.689.00	11.635.590.02
	b Pek. Pembesian Pokok dia. D19 mm	612.54	kg	16.331.00	16.331.00	10.003.429.93
	c Pek. Pembesian D13	366.57	kg	16.331.00	16.331.00	5.986.500.52
	d Pek. Bekisting	39.97	m2	210.842.00	210.842.00	8.426.494.50
6	Pek. Sloof TB1, 40X60	-	-	-	-	-
	a Pek. Beton f'c = 25 Mpa	5.72	m3	1.455.689.00	1.455.689.00	8.328.870.18
	b Pek. Pembesian Pokok dia. D16 & D13 mm	503.81	Kg	16.331.00	16.331.00	8.227.735.48
	c Pek. Pembesian sengkang dia. D10 mm	227.37	Kg	15.071.00	15.071.00	3.426.639.01
	d Pek. Bekisting	14.30	m2	184.366.00	184.366.00	2.637.171.26
7	Pek. Dinding RC WALL SW1	-	-	-	-	-
	a Pek. Beton f'c = 25 Mpa, t = 30 cm	41.70	m3	1.455.689.00	1.455.689.00	60.696.641.45
	b Pek. Pembesian D16	7.013.85	kg	16.331.00	16.331.00	114.543.185.34
	c Pek. Bekisting	277.97	m2	230.391.00	230.391.00	64.042.799.99
8	Pekerjaan Trap Tangga Bawah	-	-	-	-	-
	a Pek. Bekisting	221.11	m2	224.485.00	224.485.00	49.636.776.29
	b Pek. Pembesian Wiremesh M7, 2 Lapis	5.528.50	kg	15.695.00	15.695.00	86.769.848.31
	c Pek. Beton f'c = 25 Mpa	251.51	m3	1.455.689.00	1.455.689.00	366.126.163.15
9	Pekerjaan Dinding Luar & Plat	-	-	-	-	-
	a Pek. Bekisting	159.49	m2	224.485.00	224.485.00	35.803.025.10
	b Pek. Pembesian Wiremesh M7, 2 Lapis	1.330.14	kg	15.695.00	15.695.00	20.876.599.84
	c Pek. Beton f'c = 25 Mpa	31.90	m3	1.455.689.00	1.455.689.00	46.433.454.18
10	Pek. Plat Lantai Dibawah Pasangan Cobble Stone	-	-	-	-	-
	a Pek. Bekisting	18.84	m2	224.485.00	224.485.00	4.229.297.40
	b Pek. Pembesian Wiremesh M7, 2 Layer	17.676.63	kg	15.695.00	15.695.00	277.434.707.85
	c Pek. Beton f'c = 25 Mpa	211.95	m3	1.455.689.00	1.455.689.00	308.533.283.55
B	**PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2**	-	-	-	-	-
1	Pekerjaan Dinding RC WALL SW1	-	-	-	-	-
	a Pek. Beton f'c = 25 Mpa, T = 30 cm	0.69	m3	1.455.689.00	1.455.689.00	1.000.931.76
	b Pek. Pembesian D16	1.206.76	kg	16.331.00	16.331.00	19.707.527.74
	c Pek. Bekisting	4.58	m2	230.391.00	230.391.00	1.056.112.34
2	Pekerjaan Balok B1, 30x50	-	-	-	-	-
	a Pek. Beton f'c = 25 Mpa	5.23	m3	1.455.689.00	1.455.689.00	7.618.130.03
	b Pek. Pembesian Pokok dia. D16 & D13 mm	919.09	Kg	16.331.00	16.331.00	15.009.652.55
	c Pek. Pembesian sengkang dia. D10 mm	263.87	Kg	15.071.00	15.071.00	3.976.814.91
	d Pek. Bekisting	45.36	m2	213.283.00	213.283.00	9.673.599.76
3	Pekerjaan Balok B2, 25x40	-	-	-	-	-
	a Pek. Beton f'c = 25 Mpa	2.55	m3	1.455.689.00	1.455.689.00	3.714.918.33
	b Pek. Pembesian Pokok dia. D16 & D13 mm	458.11	Kg	16.331.00	16.331.00	7.481.333.01
	c Pek. Pembesian sengkang dia. D10 mm	155.06	Kg	15.071.00	15.071.00	2.336.939.40
	d Pek. Bekisting	26.80	m2	213.283.00	213.283.00	5.715.131.27
4	Pekerjaan Plat Lantai S1	-	-	-	-	-
	a Pek. Beton f'c = 25 Mpa, t = 18 cm	7.50	m3	1.455.689.00	1.455.689.00	10.921.161.15
	b Pek. Pembesian D13	1.396.62	kg	16.331.00	16.331.00	22.808.260.28
	c Pek. Bekisting	41.68	m2	224.485.00	224.485.00	9.356.534.80
C	**PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3**	-	-	-	-	-

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1	Pekerjaan Kolom K1, 40x40	-	-	-	-	-
a	Pek. Beton f'c = 25 Mpa	12.19	m3	1.455.689.00	1.455.689.00	17.742.170.44
b	Pek. Pembesian Pokok dia. D19 mm	2.869.16	kg	16.331.00	16.331.00	46.856.309.45
c	Pek. Pembesian sengkang dia. D130 mm	2.088.81	kg	16.331.00	16.331.00	34.112.393.74
d	Pek. Bekisting	121.88	m2	210.842.00	210.842.00	25.697.760.31
2	Pekerjaan Dinding RC WALL SW3	-	-	-	-	-
a	Pek. Beton f'c = 25 Mpa	67.14	m3	1.455.689.00	1.455.689.00	97.741.339.74
b	Pek. Pembesian D13	7.508.84	kg	16.331.00	16.331.00	122.626.911.16
c	Pek. Bekisting	447.63	m2	230.391.00	230.391.00	103.129.743.63
3	Pekerjaan Balok B1, 30x50	-	-	-	-	-
a	Pek. Beton f'c = 25 Mpa	26.86	m3	1.455.689.00	1.455.689.00	39.105.774.86
b	Pek. Pembesian Pokok dia. D16 & D13 mm	4.703.32	Kg	16.331.00	16.331.00	76.809.873.65
c	Pek. Pembesian sengkang dia. D10 mm	1.350.46	Kg	15.071.00	15.071.00	20.352.770.60
d	Pek. Bekisting	232.82	m2	213.283.00	213.283.00	49.657.017.28
D	PEKERJAAN ARSITEKTUR CATUS PATA	-	-	-	-	-
1	Pek. Pasangan Paving 10x20x6 Abu (F1)	80.56	m2	185.633.00	185.633.00	14.954.594.48
2	Pek. Pasangan Paving 10x20x6 Merah (F2)	515.18	m2	246.270.00	246.270.00	126.873.083.08
3	Pek. Pasangan Border Tangga Andesit	321.59	m	196.237.00	196.237.00	63.107.856.83
4	Pek. Pasangan Lantai dan Dinding Bata Expose (F3)	640.92	m2	897.437.00	897.437.00	575.188.781.75
5	Pek. Pasangan Patung Catus Pata (Perunggu) t = 15,5m	1.00	unit	6.892.813.175.00	6.892.813.175.00	6.892.813.175.00
6	Pek. Pasangan Batu Sikat 10 cm	363.45	m	42.088.00	42.088.00	15.296.799.42
7	Pek. Pasangan Kanstin Tipe S (P.50, T.40, LA.9, LB.16)	50.50	m	284.545.00	284.545.00	14.369.522.50
8	Pek. Pasangan Kanstin P.50, L.15, T.40 cm (Batas Jalan)	54.40	m	284.545.00	284.545.00	15.479.248.00
9	Pek. Planter Box (Bundaran)	-	-	-	-	-
a.	Pek. Pasangan Batako	150.80	m2	379.508.00	379.508.00	57.229.806.40
b.	Pek. Urugan Tanah	348.25	m3	207.654.00	207.654.00	72.315.505.50
c.	Pek. Pasangan Dinding Bata Expose	204.33	m2	897.437.00	897.437.00	183.376.891.96
d.	Pek. Pasangan Corner Guard	10.00	m	137.304.00	137.304.00	1.373.040.00
-	-	-	-			
III	PEKERJAAN PEDESTRIAN	-	-	-	-	-
1	Pek. Galian Tanah	249.26	m3	243.800.00	243.800.00	60.768.568.43
2	Pek. Pasangan Box Culvert 60x60x120 dan Uditch 60x60x120 cm	-	-	-	-	-
a	Uditch 60x60x120 cm Riadimix	243.45	m'	1.219.251.00	1.219.251.00	296.828.484.83
b	Tutup Uditch 60x120 Riadimix	243.45	m'	808.317.00	808.317.00	196.785.986.13
c	Box Culvert 60x60x120 cm Riadimix	21.23	m'	2.689.251.00	2.689.251.00	57.092.798.73
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai, t = 5 cm	40.77	m3	402.954.00	402.954.00	16.426.470.18
4	Pek. Rabatan Beton Lantai Kerja, t = 5cm ; f'c 7,5 Mpa	40.77	m3	1.305.649.00	1.305.649.00	53.224.944.69
5	Pek. Bekisting Batako	94.95	m2	379.508.00	379.508.00	36.032.798.83
6	Pek. Pembesian Wiremesh M7, 2 Layer	6.799.62	kg	15.695.00	15.695.00	106.720.080.63
7	Pek. Urugan Pasir Diatas Lantai t=5cm	40.77	m3	402.954.00	402.954.00	16.426.470.18
8	Pek. Beton f'c = 25 Mpa t=10 cm	81.53	m3	1.455.689.00	1.455.689.00	118.682.688.09
9	Pek. Pasangan Andesit Bakar 20x40x1,8	764.17	m2	394.452.00	394.452.00	301.429.370.97
10	Pek. Pasangan Kanstin P.50, L.15, T.40 cm	243.45	m'	284.545.00	284.545.00	69.272.907.07
11	Pek. Urugan Tanah Subur	23.18	m3	207.654.00	207.654.00	4.813.175.73
12	Pek. Pasangan Cobble Stone 10x10x5	417.52	m2	507.852.00	507.852.00	212.038.367.04
13	Pek. Pasangan Paving 10x20x8 Abu	1.211.65	m2	208.376.00	208.376.00	252.478.780.40
14	Pek. Pasangan Paving 10x20x8 Hitam	962.54	m2	269.013.00	269.013.00	258.935.773.02
15	Pek. Pasangan Paving 10x20x6 Merah	40.60	m2	246.270.00	246.270.00	9.998.562.00
16	Pek. Pasangan Jalan Aspal Hotmix	670.67	m2	385.278.00	385.278.00	258.394.396.26
17	Pek. Penanaman Pohon Perindang (Tabebuya) t = 4m	17.00	bh	1.918.919.00	1.918.919.00	32.621.623.00
18	Pek. Penanaman Kacang Hias t = 10-20 cm	839.00	bh	22.721.00	22.721.00	19.062.919.00
19	Pek. Pasangan Taktil Roman Yellowdot 30x30	243.45	m	285.589.00	285.589.00	69.527.070.43
-	-	-	-			
IV	PEKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH (DPT)	-	-	-	-	-
1	Pek. Galian Tanah	222.25	m3	243.800.00	243.800.00	54.183.574.80
2	Pek. Urugan Pasir	3.70	m3	402.954.00	402.954.00	1.492.581.91
3	Pek. Pasangan Batu Kosong	12.35	m3	636.577.00	636.577.00	7.859.816.22
4	Pek. Pasangan Batu Kali	148.16	m3	1.048.400.00	1.048.400.00	155.335.137.60
5	Pek. Siaran	123.47	m2	39.609.00	39.609.00	4.890.523.23
-	-	-	-			
IV	PEKERJAAN PLAZA	-	-	-	-	-
A	PEKERJAAN TAMAN & KURSI TAMAN	-	-	-	-	-
1	Pek. Galian Tanah	12.74	m3	243.800.00	243.800.00	3.105.592.66
2	Pek. Urugan Pasir	0.54	m3	402.954.00	402.954.00	218.707.31
3	Pek. Rabatan Beton Lantai Kerja, t = 5cm ; f'c 7,5 Mpa	0.54	m3	1.305.649.00	1.305.649.00	708.654.05
4	Pek. Bekisting	111.16	m2	230.391.00	230.391.00	25.609.629.52
3	Pek. Pembesian Wiremesh M7, 2 Lapis	463.53	kg	15.695.00	15.695.00	7.275.036.24
4	Pek. Beton f'c = 25 Mpa	8.34	m3	1.455.689.00	1.455.689.00	12.135.778.74
5	Pek. Waterproofing	55.58	m2	88.639.00	88.639.00	4.926.433.65
6	Pek. Pasangan Batako	15.85	m2	379.508.00	379.508.00	6.015.201.80
7	Pek. Pasangan Andesit Bakar 20x40x1,8 cm	57.89	m2	394.452.00	394.452.00	22.836.561.87
8	Pek. Pasangan Limestone Random Bukit	36.18	m2	715.752.26	715.752.26	25.898.779.78
9	Pek. Urugan Tanah	117.26	m3	207.654.00	207.654.00	24.348.765.47
B	PEKERJAAN PLANTER PLAZA (4 UNIT)	-	-	-	-	-
1	Pek. Bekisting	64.90	m2	230.391.00	230.391.00	14.951.454.34
2	Pek. Pembesian Wiremesh M7, 2 Lapis	270.62	kg	15.695.00	15.695.00	4.247.323.14
3	Pek. Beton f'c = 25 Mpa	4.87	m3	1.455.689.00	1.455.689.00	7.085.129.50
4	Pek. Pasangan Batako	30.46	m2	379.508.00	379.508.00	11.559.206.47
5	Pek. Urugan Tanah	15.98	m2	207.654.00	207.654.00	3.317.297.57
6	Pek. Pasangan Limestone Random Bukit	64.68	m2	715.752.26	715.752.26	46.294.856.18
V	PEKERJAAN MEP AREA CATUSPATA	-	-	-	-	-
A	Pekerjaan Penyambungan Daya	-	-	-	-	-
1	Penyambungan Daya PLN 3P Area Catuspata	13.200.00	VA	1.837.00	1.837.00	24.248.400.00
	Lengkap dengan BP, UJL dan SLO	-	-	-	-	-
2	Pekerjaan Panel	-	-	-	-	-
-	SDP. Catuspata Type Outdoor	1.00	unit	11.056.212.00	11.056.212.00	11.056.212.00
-	PP Type Outdoor	1.00	unit	9.213.510.00	9.213.510.00	9.213.510.00
3	Grounding sistem, Lengkap dengan Box control maks 2 ohm	1.00	ttk	16.462.454.95	16.462.454.95	16.462.454.95
		-	-	-	-	-
B	Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Kabel Feeder Tegangan Rendah	-	-	-	-	-
1	Kabel Feeder dari PLN ke SDP NYFGbY 4 x 16 mm2	40.00	m'	374.931.87	374.931.87	14.997.274.80
2	Kabel Feeder dari SDP CATUSPATA ke PP. PJU OUTDOOR NYFGbY 4 x 10 mm2	50.00	m'	274.859.10	274.859.10	13.742.955.00
		-	-	-	-	-
C	Pekerjaan Instalasi Penerangan, Stop Kontak, Exhaust & Saklar	-	-	-	-	-
1	Instalasi Lampu Penerangan Jalan, NYFGbY 4 x 6 mm2	320.00	m'	161.459.10	161.459.10	51.666.912.00
2	Lampu Penerangan Jalan 2 Lengan (120W + 60W) 4000K termasuk Tiang Octagonal	8.00	bh	23.217.395.00	23.217.395.00	185.739.160.00
5	Instalasi Lampu Taman, NYF/RGbY 3 x 2,5 mm2	240.00	m'	107.874.66	107.874.66	25.889.918.40
6	Instalasi Lampu Taman, NYF/RGbY 3 x 2,5 mm2	200.00	m'	107.874.66	107.874.66	21.574.932.00
3	Lampu Sorot BGV172 50W 3500K	8.00	bh	1.894.940.00	1.894.940.00	15.159.520.00
4	Lampu Taman GL ARBE E27 250 + LED 32W 3000K	12.00	bh	9.633.836.00	9.633.836.00	115.606.032.00
		-	-	-	-	-
D	Pekerjaan Instalasi Plumbing	-	-	-	-	-
2	Pipa PVC 6"	206.52	m'	434.641.00	434.641.00	89.761.190.04
3	Drain 6"	12.00	bh	500.000.00	500.000.00	6.000.000.00
		-	-			
		-	-	-	-	-
E	PEKERJAAN PENGANTAR PETIR	-	-	-	-	-
1	Air Terminal Radius 100m	1.00	unit	5.025.356.38	5.025.356.38	5.025.356.38
2	Kabel NYY 1 x 70mm	80.00	m'	299.073.70	299.073.70	23.925.896.00
3	Obstuction Lamp & instalasi	1.00	bh	3.461.486.00	3.461.486.00	3.461.486.00

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
4	Connecting Sleeve lengkap surge Arester	1.00	bh	1.184.981.00	1.184.981.00	1.184.981.00
5	Lightening Flash Counter	1.00	bh	4.696.181.00	4.696.181.00	4.696.181.00
6	Tiang Galvanis	5.00	m'	614.620.40	614.620.40	3.073.102.00
7	Grounding sistem	1.00	ttk	16.462.454.95	16.462.454.95	16.462.454.95
	- Copper road	-	-	-	-	-
	- Pentanahan max.2 Ohm bahan GSP dia.50mm² + BC.70mm²	-	-	-	-	-
	- Bak kontrol (40x40) cm lengkap tutup	-	-	-	-	-
	- Testing/pengukuran pentanahan	-	-	-	-	-
	- Material bantu dan accessories	-	-	-	-	-
	- Perijinan ke DepNaker RI	-	-	-	-	-
		-	-			
					TOTAL	14.350.000.001.40
					DIBULATKAN	14.350.000.000.00
					PPN 11%	1.578.500.000.00
					TOTAL HARGA	15.928.500.000.00

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Telepon (0361) 701954, 701797, 701812
Laman www.unud.ac.id

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 03.III/UN14.8/PL/SPPBJ/KONS/2026 Jimbaran, 22 April 2026

Lampiran : -

Kepada Yth.
PT. MEGATAMA KARYA
di Denpasar (Kota)

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan Pembangunan Catus Pata Universitas Udayana

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 016/MK-Penawaran/IV/2026 tanggal 16 April 2026 perihal Penawaran Pembangunan Catus Pata Universitas Udayana dengan *[nilai penawaran/penawaran terkoreksi]nilai penawaran/penawaran terkoreksi]* sebesar Rp. **15.928.500.000,00** (***Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah***) termasuk PPN, kami nyatakan diterima /disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. **1.592.850.000,00** (***Satu Milliar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima puluh Ribu Rupiah***) *[5% dari nilai kontrak untuk nilai penawaran/ terkoreksi antara 90% sampai dengan 100% HPS atau 10% dari HPS untuk nilai penawaran/terkoreksi dibawah 90% HPS]* dengan masa berlaku **minimal** selama **240** (**Dua ratus empat puluh**) hari kalender [sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan] dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya dan Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Universitas Udayana.

Satuan Kerja
UNIVERSITAS UDAYANA
Pejabat Penandatangan Kontrak

Lie Jasa
NIP. 196612181991031003

Tembusan Yth.:
1. KPA Universitas Udayana
2. Pokja Pemilihan Pembangunan Catus Pata Universitas Udayana
3. SPI Unud

III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pengguna Jasa : Universitas Udayana Nama : Universitas Udayana Alamat : Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Badung, Bali Website : www.unud.ac.id E-mail : unud.ac.id Faksimili : - Penyedia : Nama : PT. MEGATAMA KARYA Alamat : Jl. Sekar Jepun VI No. 2 Denpasar E-mail : pt.megatamakarya@gmail.com Faksimili : -
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pengguna Jasa: Nama : LIE JASA Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Udayana nomor : 1/UN14/HK/2026 tanggal 2 Januari 2026, Tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Universitas Udayana. Untuk Penyedia: Nama : Ida Bagus Wayan Mega Antara, ST. Berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Perusahaan Nomor : 10 Tanggal : 24 Juli 2024, Notaris : Putu Ayu Mas Ratih, SH., M. Kn.
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Rekening Kas BLU Universitas Udayana
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama **240 [Dua Ratus Empat Puluh]** hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	1. Tidak ada

<table>
<tr><td>33.8</td><td>Masa Pemeliharaan</td><td>Masa Pemeliharaan berlaku selama 365 [tiga ratus enam puluh lima] hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).</td></tr>
<tr><td>33.19</td><td>Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)</td><td>Tidak ada

Dipertegas dalam kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan secara keseluruhan/ sekaligus.</td></tr>
<tr><td>33.22</td><td>Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)</td><td>Tidak ada</td></tr>
<tr><td>35.1</td><td>Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan</td><td>Gambar "As built" diserahkan paling lambat dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.</td></tr>
<tr><td>38.7</td><td>Penyesuaian Harga</td><td>Penyesuaian tidak diberikan] dalam hal diberikan maka rumusannya sebagai berikut:

<table>
<tr><td>Hn</td><td>=</td><td>Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)</td></tr>
<tr><td>Hn</td><td>=</td><td>Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;</td></tr>
<tr><td>Ho</td><td>=</td><td>Harga Satuan pada saat harga penawaran;</td></tr>
<tr><td>A</td><td>=</td><td>Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15</td></tr>
<tr><td>b, c, d</td><td>=</td><td>Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00</td></tr>
<tr><td>Bn, Cn, Dn</td><td>=</td><td>Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan</td></tr>
<tr><td>Bo, Co, Do</td><td>=</td><td>Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

jdih.pu.go.id

Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar, dan sebagainya ditetapkan seperti contoh sebagai berikut:

Pekerjaan	KoefisienKomponen a.	b.	c.	d.	a+b+c+d
Timbunan	0,15	....	....	....	1,00
Galian	0,15	....	....	....	1,00
Galian dengan alat	0,15	....	....	....	1,00
Beton	0,15	....	....	....	1,00
Betonbertulang	0,15	....	....	....	1,00

b) Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh Pengguna Jasa dari perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya (apabila ada) terhadap Harga Satuan dari pembobotan HPS dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan (Rancangan Kontrak).

c) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

d) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

e) Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai berikut:

Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst

Pn = Harga Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

f) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g) Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan.

h) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh

jdih.pu.go.id

		Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK .
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : 1. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; 2. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak 3. Penyedia bertanggungjawab atas : a. Pelaksanaan kontrak b. Kualitas barang/ jasa c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume; d. Ketepatan waktu penyerahan; dan e. Ketepatan tempat penyerahan
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengguna Jasa	Tindakan lain oleh Penyedia yangmemerlukan persetujuan PPK adalah Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan tindakan berikut: - menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK; - mengubah atau memutakhirkan program mutu; - tindakan lain yang diatur dalam SSKK;
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: - menggunakan spesifikasi dan gambar dalam Pasal 15 SSUK sonil Inti dan/atau Peralatan; - tindakan lain yang diatur dalam SSKK;
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: - Untuk penilaian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis PPK dan PA
65	Fasilitas	PPK akan memberikan fasilitas berupa : - Informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan; - Koordinasi dengan instansi terkait (bila diperlukan);
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Tidak ada
70.1.(e)	Besaran Uang Muka	Tidak ada.

70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Sistem Angsuran (Thermyn). Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : A. Angsuran I (Pertama) diberikan sebesar 10% dari Nilai Kontrak atau 10% x Rp. 15.928.500.000,00 = Rp. 1.592.850.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah fisik pekerjaan mencapai 15% yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi/Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Catus Pata Universitas Udayana. B. Angsuran II (Kedua) diberikan sebesar 10% dari Nilai Kontrak atau 10% x Rp. 15.928.500.000,00 = Rp. 1.592.850.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah fisik pekerjaan mencapai 25% yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi/Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Catus Pata Universitas Udayana. C. Angsuran III (Ketiga) diberikan sebesar 15% dari Nilai Kontrak atau 15% x Rp. 15.928.500.000,00 = Rp. 2.389.275.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) setelah fisik pekerjaan mencapai 40% yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi/Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Catus Pata Universitas Udayana. D. Angsuran IV (Keempat) diberikan sebesar 25% dari Nilai Kontrak atau 25% x Rp.15.928.500.000,00 = Rp. 3.982.125.000,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setelah fisik pekerjaan mencapai 65% yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi/Kemajuan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Catus Pata Universitas Udayana. E. Angsuran V (Kelima) diberikan sebesar 30% dari Nilai Kontrak atau 30% x Rp. 15.928.500.000,00 = Rp. 4.778.550.000,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ekerjaan mencapai 95% yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi/Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Catus Pata Universitas Udayana. F. Angsuran VI (Keenam) diberikan sebesar 5% dari Nilai Kontrak atau 5% x Rp.15.928.500.000,00 = Rp. 796.425.000.00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setelah fisik pekerjaan mencapai 100 % yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi/Kemajuan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Catus Pata Universitas Udayana.

		G. Angsuran VII (Ketujuh) diberikan sebesar 5% dari Nilai Kontrak yaitu sebesar 5% x Rp.15.928.500.000,00 = Rp. 796.425.000.00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dibayarkan kepada PIHAK Penyedia setelah selesainya masa pemeliharaan yang dinyatakan dengan suatu berita acara Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Catus Pata Universitas Udayana untuk pembayaran angsuran yang disetujui / ditandatangani oleh PIHAK PENGGUNA JASA atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan dilampiri Berita Acara Serah Terima II (Kedua) Pekerjaan Fisik atau bisa dibayarkan sebelum selesainya masa pemeliharaan dengan menyerahkan Jaminan Pemeliharaan dari Bank Pemerintah / Bank Lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan minimal sebesar tagihan. Pembayaran tersebut dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Universitas Udayana, melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Renon dengan rekening nomor : 0100100023931 atas nama PT. MEGATAMA KARYA
70.3.(e)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (material onsite), ditetapkan sebagai berikut : 1. Tidak ada
70.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari sisa pekerjaan (sebelum PPN);
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 20 (dua puluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG*)

No	Mata Pembayaran	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan HPS (Rp)	Harga Satuan Penawaran (Rp)	% Terhadap HPS	Keterangan

Catatan:
*)Didapatkan dari pokja pemilihan (apabila ada)

DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBPENYEDIA (apabila ada)

a. Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan*)	Nama Sub penyedia**)	Alamat Sub penyedia**)	Kualifikasi Sub penyedia**)	Keterangan
1					
2					
3					
4					

Catatan:
*) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak
**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

b. Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan*)	Nama Subpenyedia**)	Alamat Subpenyedia**)	Kualifikasi Subpenyedia**)	Keterangan
1	.....	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....	.....
3	Dst				

Catatan:
*) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak
**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

No	Nama Personel Manajerial	Jabatan dalam Pekerjaan ini*)	Tingkat Pendidikan/Ijazah	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun)*)	Sertifikat Kompetensi Kerja*)	Keterangan
1	Ida Bagus Wayan Mega Antara, ST.	Manajer Pelaksanaan/ Proyek	S1 Teknik Sipil, Tahun 1996	8 Tahun	Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi Jenjang 9 (Sembilan)	
2	Gede Widiada	Manajer Teknik	S1 Teknik Sipil, Tahun 1996	7 Tahun	Ahli Teknik Bangunan *Gedung* Jenjang 9 (Sembilan)	
3	Ida Ayu Sri Hartati Mahastuti	Manager Keuangan	S1 Ekonomi Tahun 2005	8 Tahun	Ijasah	
4	Ida Ayu Putu Sri Mahapatni, ST., MT.	Ahli K3 Konstruksi	S2 Teknik Sipil Tahun 2012	6 Tahun	Ahli Madya K3 Konstruksi Jenjang 8 (Delapan)	

Catatan:

*) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak

**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

DAFTAR PERSONEL PENDUKUNG

No	Nama Personel Manajerial	Jabatan dalam Pekerjaan ini*)	Tingkat Pendidikan/Ijazah	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun)*)	Sertifikat Kompetensi Kerja*)	Keterangan
1	Ni Made Ayu Indri Utami Dewi	Pelaksana	S1 Teknik Sipil, Tahun 2023	4 Tahun	Pelaksana Lapangan Pekerjaan *Gedung* Jenjang 4 (Empat)	
2	I Gede Agun Bisma Putra	Drafter	S1 Teknik Arsitektur, Tahun 2022	3 Tahun	Juru Gambar Kepala Bidang Konstruksi Jenjang 4 (Empat)	

3	I Wyn Kalyana Hutama Putra, ST.	Juru Ukur	S1 Teknik Sipil, Tahun 2020	2 Tahun	Juru Ukur (Surveyor) Jenjang 3 (Tiga)	
4.	I Wayan Putu Artha Wedha	Logistik	SMA, Tahun 2019	2 Tahun	-	
5	Dewa Ayu Sulistyadewi	Admin Teknik	S1 Teknik Sipil, Tahun 2021	2 Tahun	-	

Catatan:

*) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak

**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

DAFTAR PERALATAN UTAMA

No	Nama Peralatan Utama*)	Merk dan Tipe**)	Kapasitas **)	Jumlah **)	Kondisi **)	Status Kepemilikan **)	Keterangan
1	Mobile Crane	Kato/NK-550VR	Kapasitas 55 Ton Panjang Lengan 43 m	1 Unit	Baik	Sewa	Surat Perjanjian Sewa
2	Excavator + Hydrolik Breaker	Zoomlion + Assy/ ZE215E+ EDT2200	Berat Operasional : 22,1 Ton Kapasitas Bucket : 1.0 m3 Daya Mesin : 150 HP	1 Unit	Baik	Sewa	Surat Perjanjian Sewa
3	Genset	Denyo	25 Kva	1 Unit	Baik	Sewa	Surat Perjanjian Sewa
4	Concrete Pump	Isuzu/CYZ81	Panjang Boom Vertikal : 36 m Panjang Boom Horizontal: 36 m Tekanan Pipa: 100 Bar Kapasitas Output 135 m3/Jam	1 Unit	Baik	Sewa	Surat Perjanjian Sewa
5	Dump Truck	Mitsubishi/FN5 27MS	15 m3	2 Unit	Baik	Sewa	Surat Perjanjian Sewa
6	Mesin Las	Lakoni/Falcon 120E	Daya Listrik : 900 Watt Arus Output : 10-120 Ampere Dia Kawat Las : 2-4 mm	1 Unit	Baik	Milik Sendiri	Invoice dan Kwitansi

DAFTAR PERALATAN PENDUKUNG

No	Nama Peralatan Utama*)	Merk dan Tipe**)	Kapasitas **)	Jumlah **)	Kondisi **)	Status Kepemilikan **)	Keterangan
1	Scafolding	-	Bahan Besi	100 Set	Baik	Milik Sendiri	Nota
2	Mesin potong	Bosch	Input Daya Listrik : 1400 Watt Kecepatan Tanpa Beban: 13.200 RPM Diameter Mata Pisau : 115 mm Kedalaman Potong : 35 mm	2 Unit	Baik	Milik Sendiri	Nota
3	Stamper	Mikasa	Plate Size (LxW) : 340x285 mm Jumping Stroke : 50-80 mm Impact Number : 644 – 695 blow/min Impact Force 13.7 Kn (1,400 kgf)	1 Unit	Baik	Milik Sendiri	Nota
4	Total Station	Topcon	EDM Range : Reflectorless 500 m Prism 4,000 m Anggle accuracy : 2'' Internal memory : 50.000 points	1 Unit	Baik	Milik Sendiri	Kwitansi
5	Chain Block	Kondotec	Kapasitas : 2 Ton Standar Lift: 10 Meter Pull to lift : 34 (kg) – 333 (N)				

Catatan:

*) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak

**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

PT. MEGATAMA KARYA	RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN CATUS PATA UNIVERSITAS UDAYANA

DAFTAR ISI

A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
   A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
   A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi

B. Perencanaan keselamatan konstruksi
   B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang
   B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
   B.3. Standar dan peraturan perundangan

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
   C.1. Sumber Daya
   C.2. Kompetensi
   C.3. Kepedulian
   C.4. Komunikasi
   C.5. Informasi Terdokumentasi

D. Operasi Keselamatan Konstruksi
   D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
   D.2. Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat

E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
   E.1. Pemantauan dan evaluasi
   E.2. Tinjauan manajemen
   E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

A. KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI

A.1 KEPEDULIAN PIMPINAN TERHADAP ISU EKTERNAL DAN INTERNAL

PT. MEGATAMA KARYA yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi berkomitmen dan peduli terhadap Keselamatan Konstruksi khusus dalam pencapaian penanganan isu keselamatan konstruksi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peduli dalam mempromosikan pemahaman akan kebutuhan keselamatan konstruksi dan membudayakan keselamatan konstruksi dalam seluruh kegiatan pelaksanaan konstruksi

2. Peduli dalam melakukan sosialisasi tentang keselamatan konstruksi terhadap seluruh tenaga kerja maupun masyarakat didalam lingkungan kerja konstruksi

3. Peduli dalam melaksanakan implementasi sesuai rencana keselamatan konstruksi bedasarkan perundang-undangan yang berlaku dalam keselamatan konstruksi nasional

4. Mencegah kecelakaan, kebakaran, sakit akibat kerja, keamanan dan pencemaran lingkungan

5. Memantau dan mengevaluasi terhadap kinerja keselamatan konstruksi serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan

Denpasar, 16 April 2026
PT. MEGATAMA KARYA



Ida Bagus Wayan Mega Antara, ST
Direktur

A.2 KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Ida Bagus Wayan Mega Antara, ST
Jabatan	:	Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	:	PT. MEGATAMA KARYA

Dalam rangka pengadaan **Pembangunan Catus Pata Universitas Udayana** pada **Pokja Pemilihan Pembangunan Catus Pata Universitas Udayana** berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK

Denpasar, 16 April 2026
PT. MEGATAMA KARYA



Ida Bagus Wayan Mega Antara, ST
Direktur

B. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

B.1 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RESIKO, PENGENDALIAN DAN PELUANG

Nama Perusahaan : PT. MEGATAMA KARYA
Pekerjaan : Pembangunan Catus Pata Universitas Udayana
Lokasi : Jl. Kampus Unud Bukit Jimbaran
Tanggal dibuat : 16 April 2026

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pekerjaan Struktur	- Kecelakaan pada saat bekerja	Kesehatan tubuh terganggu luka ringan hingga berat	- UU No 1 Tahun 1970 UU Nomor 13 Tahun 2003 Permen PU No. 09/PRT/M/2008 Permen PU No. 10 Tahun 2021	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati hati	2	3	6	Sedang	Administratif	2	3	6	6	
		Terjatuh dari ketinggian	Kesehatan tubuh terganggu - luka ringan hingga berat	UU No 1 Tahun 1970 UU Nomor 13 Tahun 2003 Permen PU No. 09/PRT/M/2008 Permen PU No. 10 Tahun 2021	Menggunakan APD lengkap Bekerja dengan hati hati - Memasang perancah dengan baik	3	5	15	Besar	Administratif	3	5	15	15	
		Tertimpa alat berat	Kesehatan tubuh terganggu - luka ringan hingga berat	UU No 1 Tahun 1970 - UU Nomor 13 Tahun 2003 Permen PU No. 09/PRT/M/2008 - Permen PU No. 10 Tahun 2021	Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati hati	4	4	16	Besar	Administratif	4	4	16	16	
		Tertimpa balok beton	Kesehatan tubuh terganggu luka ringan hingga berat	UU No 1 Tahun 1970 - UU Nomor 13 Tahun 2003 Permen PU No. 09/PRT/M/2008 Permen PU No. 10 Tahun 2021	Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati hati	3	4	12	Besar	Administratif	3	4	12	12	
		Terkena benda tajam	Kesehatan tubuh terganggu luka ringan hingga berat	UU No 1 Tahun 1970 - UU Nomor 13 Tahun 2003 Permen PU No. 09/PRT/M/2008 - Permen PU No. 10 Tahun 2021	Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati hati	2	4	8	Sedang	Administratif	2	4	8	8	
		Mata terkena debu	Kesehatan tubuh terganggu - luka ringan hingga berat	UU No 1 Tahun 1970 UU Nomor 13 Tahun 2003 Permen PU No. 09/PRT/M/2008 Permen PU No. 10 Tahun 2021	Menggunakan APD lengkap Bekerja dengan hati hati	5	1	5	Kecil	Administratif	5	1	5	5	
		Terpleset	Kesehatan tubuh terganggu - luka ringan hingga berat	UU No 1 Tahun 1970 UU Nomor 13 Tahun 2003 - Permen PU No. 09/PRT/M/2008 Permen PU No. 10 Tahun 2021	Menggunakan APD lengkap Bekerja dengan hati hati	5	1	5	Kecil	Administratif	5	1	5	5	
		Terluka kena benda kerja	Kesehatan tubuh terganggu - luka ringan hingga berat	- UU No 1 Tahun 1970 UU Nomor 13 Tahun 2003 - Permen PU No. 09/PRT/M/2008 Permen PU No. 10 Tahun 2021	- Menggunakan APD lengkap Bekerja dengan hati hati	2	4	8	Sedang	Administratif	2	4	8	8	

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
2	Pekerjaan Arsitektur	- Kecelakaan pada saat bekerja	- Kesehatan tubuh terganggu - luka ringan hingga berat	- UU No 1 Tahun 1970 - UU Nomor 13 Tahun 2003 - Permen PU No 09/PRT/M/2008 - Permen PU No 10 Tahun 2021	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	2	3	6	Sedang	Administratif	2	3	6	6	
	- Tertatuh	- Kesehatan tubuh terganggu - luka ringan hingga berat	- UU No 1 Tahun 1970 - UU Nomor 13 Tahun 2003 - Permen PU No 09/PRT/M/2008 - Permen PU No 10 Tahun 2021	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	3	3	9	Sedang	Administratif	3	3	9	9	
	- Tertimpa alat kerja	- Kesehatan tubuh terganggu - luka ringan hingga berat	- UU No 1 Tahun 1970 - UU Nomor 13 Tahun 2003 - Permen PU No 09/PRT/M/2008 - Permen PU No 10 Tahun 2021	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	3	3	9	Sedang	Administratif	3	3	9	9	
	- Terkena benda tajam	- Kesehatan tubuh terganggu - luka ringan hingga berat	- UU No 1 Tahun 1970 - UU Nomor 13 Tahun 2003 - Permen PU No 09/PRT/M/2008 - Permen PU No 10 Tahun 2021	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	2	4	8	Sedang	Administratif	2	4	8	8	
	- Mata terkena debu	- Kesehatan tubuh terganggu - luka ringan hingga berat	- UU No 1 Tahun 1970 - UU Nomor 13 Tahun 2003 - Permen PU No 09/PRT/M/2008 - Permen PU No 10 Tahun 2021	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	5	1	5	Kecil	Administratif	5	1	5	5	
	- Terpleset	- Kesehatan tubuh terganggu - luka ringan hingga berat	- UU No 1 Tahun 1970 - UU Nomor 13 Tahun 2003 - Permen PU No 09/PRT/M/2008 - Permen PU No 10 Tahun 2021	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	5	1	5	Kecil	Administratif	5	1	5	5	
	- Terluka kena benda kerja	- Kesehatan tubuh terganggu - luka ringan hingga berat	- UU No 1 Tahun 1970 - UU Nomor 13 Tahun 2003 - Permen PU No 09/PRT/M/2008 - Permen PU No 10 Tahun 2021	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	2	4	8	Sedang	Administratif	2	4	8	8	
	- Terhirup debu	- Kesehatan tubuh terganggu - luka ringan hingga berat	- UU No 1 Tahun 1970 - UU Nomor 13 Tahun 2003 - Permen PU No 09/PRT/M/2008 - Permen PU No 10 Tahun 2021	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	5	1	5	Kecil	Administratif	5	1	5	5	

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
3	Pekerjaan Patung Catus Pata	Kecelakaan pada saat bekerja	Kesehatan tubuh terganggu luka ringan hingga berat	UU No 1 Tahun 1970 UU Nomor 13 Tahun 2003 Permen PU No 09/PRT/M/2008 Permen PU No 10 Tahun 2021	Menggunakan APD lengkap Bekerja dengan hati-hati	2	3	6	Sedang	Administratif	2	3	6	6	
		Tegatuh dari ketinggian	Kesehatan tubuh terganggu luka ringan hingga berat	UU No 1 Tahun 1970 UU Nomor 13 Tahun 2003 Permen PU No 09/PRT/M/2008 Permen PU No 10 Tahun 2021	Menggunakan APD lengkap Bekerja dengan hati-hati Memasang perancah dengan baik	3	5	15	Besar	Administratif	3	5	15	15	
		Tertimpa alat berat	Kesehatan tubuh terganggu luka ringan hingga berat	UU No 1 Tahun 1970 UU Nomor 13 Tahun 2003 Permen PU No 09/PRT/M/2008 Permen PU No 10 Tahun 2021	Menggunakan APD lengkap Bekerja dengan hati-hati	4	4	16	Besar	Administratif	4	4	16	16	
		Tertimpa balok beton	Kesehatan tubuh terganggu luka ringan hingga berat	UU No 1 Tahun 1970 UU Nomor 13 Tahun 2003 Permen PU No 09/PRT/M/2008 Permen PU No 10 Tahun 2021	Menggunakan APD lengkap Bekerja dengan hati-hati	3	4	12	Besar	Administratif	3	4	12	12	
		Terkena benda tajam	Kesehatan tubuh terganggu luka ringan hingga berat	UU No 1 Tahun 1970 UU Nomor 13 Tahun 2003 Permen PU No 09/PRT/M/2008 Permen PU No 10 Tahun 2021	Menggunakan APD lengkap Bekerja dengan hati-hati	2	4	8	Sedang	Administratif	2	4	8	8	
		Mata terkena debu	Kesehatan tubuh terganggu luka ringan hingga berat	UU No 1 Tahun 1970 UU Nomor 13 Tahun 2003 Permen PU No 09/PRT/M/2008 Permen PU No 10 Tahun 2021	Menggunakan APD lengkap Bekerja dengan hati-hati	5	1	5	Kecil	Administratif	5	1	5	5	
		Terpleset	Kesehatan tubuh terganggu luka ringan hingga berat	UU No 1 Tahun 1970 UU Nomor 13 Tahun 2003 Permen PU No 09/PRT/M/2008 Permen PU No 10 Tahun 2021	Menggunakan APD lengkap Bekerja dengan hati-hati	5	1	5	Kecil	Administratif	5	1	5	5	
		Terluka kena benda kerja	Kesehatan tubuh terganggu luka ringan hingga berat	UU No 1 Tahun 1970 UU Nomor 13 Tahun 2003 Permen PU No 09/PRT/M/2008 Permen PU No 10 Tahun 2021	Menggunakan APD lengkap Bekerja dengan hati-hati	2	4	8	Sedang	Administratif	2	4	8	8	

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
4	Pekerjaan Plaza	Kecelakaan pada saat bekerja	- Kesehatan tubuh terganggu - luka ringan hingga berat	UU No 1 Tahun 1970 UU Nomor 13 Tahun 2003 Permen PU No. 09/PRT/M/2008 Permen PU No. 10 Tahun 2021	Menggunakan APD lengkap Bekerja dengan hati-hati	2	3	6	Sedang	Administratif	2	3	6	6	
		Terluka kena mesin potong	Kesehatan tubuh terganggu luka ringan hingga berat	UU No 1 Tahun 1970 UU Nomor 13 Tahun 2003 Permen PU No. 09/PRT/M/2008 Permen PU No. 10 Tahun 2021	Menggunakan APD lengkap Bekerja dengan hati-hati	3	5	15	Besar	Administratif	3	5	15	15	
		Tersengat listrik	Kesehatan tubuh terganggu luka ringan hingga berat	UU No 1 Tahun 1970 UU Nomor 13 Tahun 2003 Permen PU No. 09/PRT/M/2008 Permen PU No. 10 Tahun 2021	Menggunakan APD lengkap Bekerja dengan hati-hati	3	5	15	Besar	Administratif	3	5	15	15	
		Terkena benda kerja	Kesehatan tubuh terganggu luka ringan hingga berat	UU No 1 Tahun 1970 UU Nomor 13 Tahun 2003 Permen PU No. 09/PRT/M/2008 Permen PU No. 10 Tahun 2021	Menggunakan APD lengkap Bekerja dengan hati-hati	2	4	8	Sedang	Administratif	2	4	8	8	
		Mata terkena debu	Kesehatan tubuh terganggu luka ringan hingga berat	UU No 1 Tahun 1970 UU Nomor 13 Tahun 2003 Permen PU No. 09/PRT/M/2008 Permen PU No. 10 Tahun 2021	Menggunakan APD lengkap Bekerja dengan hati-hati	5	1	5	Kecil	Administratif	5	1	5	5	
		Sesak nafas terhirup debu	Kesehatan tubuh terganggu luka ringan hingga berat	UU No 1 Tahun 1970 UU Nomor 13 Tahun 2003 Permen PU No. 09/PRT/M/2008 Permen PU No. 10 Tahun 2021	Menggunakan APD lengkap Bekerja dengan hati-hati	5	1	5	Kecil	Administratif	5	1	5	5	
5	Pekerjaan Pedestrian	Kecelakaan pada saat bekerja	Kesehatan tubuh terganggu luka ringan hingga berat	UU No 1 Tahun 1970 UU Nomor 13 Tahun 2003 Permen PU No. 09/PRT/M/2008 Permen PU No. 10 Tahun 2021	Menggunakan APD lengkap Bekerja dengan hati-hati	2	3	6	Sedang	Administratif	2	3	6	6	
		Terluka kena mesin potong	Kesehatan tubuh terganggu luka ringan hingga berat	UU No 1 Tahun 1970 UU Nomor 13 Tahun 2003 Permen PU No. 09/PRT/M/2008 Permen PU No. 10 Tahun 2021	Menggunakan APD lengkap Bekerja dengan hati-hati	3	5	15	Besar	Administratif	3	5	15	15	
		Tersengat listrik	Kesehatan tubuh terganggu luka ringan hingga berat	UU No 1 Tahun 1970 UU Nomor 13 Tahun 2003 Permen PU No. 09/PRT/M/2008 Permen PU No. 10 Tahun 2021	Menggunakan APD lengkap Bekerja dengan hati-hati	3	5	15	Besar	Administratif	3	5	15	15	
		Terkena benda kerja	Kesehatan tubuh terganggu luka ringan hingga berat	UU No 1 Tahun 1970 UU Nomor 13 Tahun 2003 Permen PU No. 09/PRT/M/2008 Permen PU No. 10 Tahun 2021	Menggunakan APD lengkap Bekerja dengan hati-hati	2	4	8	Sedang	Administratif	2	4	8	8	
		Mata terkena debu	Kesehatan tubuh terganggu luka ringan hingga berat	UU No 1 Tahun 1970 UU Nomor 13 Tahun 2003 Permen PU No. 09/PRT/M/2008 Permen PU No. 10 Tahun 2021	Menggunakan APD lengkap Bekerja dengan hati-hati	5	1	5	Kecil	Administratif	5	1	5	5	
		Sesak nafas terhirup debu	Kesehatan tubuh terganggu luka ringan hingga berat	UU No 1 Tahun 1970 UU Nomor 13 Tahun 2003 Permen PU No. 09/PRT/M/2008 Permen PU No. 10 Tahun 2021	Menggunakan APD lengkap Bekerja dengan hati-hati	5	1	5	Kecil	Administratif	5	1	5	5	

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
6	Pekerjaan instalasi Listrik	Kecelakaan pada saat bekerja	- Kesehatan tubuh terganggu - luka ringan hingga berat	- UU No 1 Tahun 1970 - UU Nomor 13 Tahun 2003 - Permen PU No. 09/PRT/M/2005 - Permen PU No. 10 Tahun 2021	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	2	3	6	Sedang	Administratif	2	3	6	6	
	Tersengat listrik	- Kesehatan tubuh terganggu - luka ringan hingga berat	- UU No 1 Tahun 1970 - UU Nomor 13 Tahun 2003 - Permen PU No. 09/PRT/M/2005 - Permen PU No. 10 Tahun 2021	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	3	5	15	Besar	Administratif	3	5	15	15	
	Tertimpa alat kerja	- Kesehatan tubuh terganggu - luka ringan hingga berat	- UU No 1 Tahun 1970 - UU Nomor 13 Tahun 2003 - Permen PU No. 09/PRT/M/2005 - Permen PU No. 10 Tahun 2021	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	2	4	8	Sedang	Administratif	2	4	8	8	
	Terkena benda tajam	- Kesehatan tubuh terganggu - luka ringan hingga berat	- UU No 1 Tahun 1970 - UU Nomor 13 Tahun 2003 - Permen PU No. 09/PRT/M/2005 - Permen PU No. 10 Tahun 2021	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	2	4	8	Sedang	Administratif	2	4	8	8	
	Mata terkena debu	- Kesehatan tubuh terganggu - luka ringan hingga berat	- UU No 1 Tahun 1970 - UU Nomor 13 Tahun 2003 - Permen PU No. 09/PRT/M/2005 - Permen PU No. 10 Tahun 2021	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	5	1	5	Kecil	Administratif	5	1	5	5	
	Terjatuh	- Kesehatan tubuh terganggu - luka ringan hingga berat	- UU No 1 Tahun 1970 - UU Nomor 13 Tahun 2003 - Permen PU No. 09/PRT/M/2005 - Permen PU No. 10 Tahun 2021	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	3	3	9	Sedang	Administratif	3	3	9	9	
	Terluka kena benda kerja	- Kesehatan tubuh terganggu - luka ringan hingga berat	- UU No 1 Tahun 1970 - UU Nomor 13 Tahun 2003 - Permen PU No. 09/PRT/M/2005 - Permen PU No. 10 Tahun 2021	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	2	4	8	Sedang	Administratif	2	4	8	8	

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
7	Pekerjaan Galian dan Tanah	Kecelakaan pada saat bekerja	Kesehatan tubuh terganggu luka ringan hingga berat	UU No 1 Tahun 1970 UU Nomor 13 Tahun 2003 Permen PU No. 09 PRT M/2008 Permen PU No. 10 Tahun 2021	Menggunakan APD lengkap Bekerja dengan hati hati	2	3	6	Sedang	Administratif	2	3	6	6	
	Terperosok	Kesehatan tubuh terganggu luka ringan hingga berat	UU No 1 Tahun 1970 UU Nomor 13 Tahun 2003 Permen PU No. 09 PRT M/2008 Permen PU No. 10 Tahun 2021	Menggunakan APD lengkap Bekerja dengan hati hati	3	3	9	Sedang	Administratif	3	3	9	9	
	Tertimpa alat kerja	Kesehatan tubuh terganggu luka ringan hingga berat	UU No 1 Tahun 1970 UU Nomor 13 Tahun 2003 Permen PU No. 09 PRT M/2008 Permen PU No. 10 Tahun 2021	Menggunakan APD lengkap Bekerja dengan hati hati	2	4	8	Sedang	Administratif	2	4	8	8	
	Terjepit alat berat	Kesehatan tubuh terganggu luka ringan hingga berat	UU No 1 Tahun 1970 UU Nomor 13 Tahun 2003 Permen PU No. 09 PRT M/2008 Permen PU No. 10 Tahun 2021	Menggunakan APD lengkap Bekerja dengan hati hati	2	4	8	Sedang	Administratif	2	4	8	8	
	Mata terkena debu	Kesehatan tubuh terganggu luka ringan hingga berat	UU No 1 Tahun 1970 UU Nomor 13 Tahun 2003 Permen PU No. 09 PRT M/2008 Permen PU No. 10 Tahun 2021	Menggunakan APD lengkap Bekerja dengan hati hati	5	1	5	Kecil	Administratif	5	1	5	5	
	Tertuka kena benda kerja	Kesehatan tubuh terganggu luka ringan hingga berat	UU No 1 Tahun 1970 UU Nomor 13 Tahun 2003 Permen PU No. 09 PRT M/2008 Permen PU No. 10 Tahun 2021	Menggunakan APD lengkap Bekerja dengan hati hati	2	4	8	Sedang	Administratif	2	4	8	8	
	Terhirup bahan galian	Kesehatan tubuh terganggu luka ringan hingga berat	UU No 1 Tahun 1970 UU Nomor 13 Tahun 2003 Permen PU No. 09 PRT M/2008 Permen PU No. 10 Tahun 2021	Menggunakan APD lengkap Bekerja dengan hati hati	2	4	8	Sedang	Administratif	2	4	8	8	
	Terserempet dump truk	Kesehatan tubuh terganggu luka ringan hingga berat	UU No 1 Tahun 1970 UU Nomor 13 Tahun 2003 Permen PU No. 09 PRT M/2008 Permen PU No. 10 Tahun 2021	Menggunakan APD lengkap Bekerja dengan hati hati	1	6	6	Sedang	Administratif	1	6	6	6	

Catatan

Kekerapan \ Keparahan	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

KETERANGAN

1-4 : TINGKAT RESIKO KECIL

5-12 : TINGKAT RESIKO SEDANG

15-25 : TINGKAT RESIKO BESAR

Dibuat Oleh
PT. MEGATAMA KARYA

IDA BAGUS WAYAN MEGA ANTARA,ST
Direktur

B.2 RENCANA TINDAKAN (SASARAN DAN PROGRAM K3)

1. *Sasaran Umum K3*

a. Tidak ada kecelakaan kerja yang berdampak korban jiwa (Zero Fatal Accident) pada pekerjaan konstruksi
b. Tingkat penerapan elemen SMK3 minimal 80%
c. Semua pekerjaan wajib memakai APD yang sesuai bahaya dan resiko pekerjaan masing-masing
d. Mutu kerja yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan Pelanggan, dengan parameter pencapaian, yaitu : Tanpa keluhan dari Pelanggan tentang mutu setiap proyek
e. Durasi pelaksanaan proyek sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dengan Pelanggan dengan parameter keterlambatan: Tepat waktu dan tidak pernah terlambat
f. Setiap proyek agar tidak memberikan dampak negatif terhadap Lingkungan Hidup *sesuai dengan evaluasi dari pihak yang berwenang*
g. Setiap proyek agar tidak memberikan dampak negatif terhadap Lingkungan Hidup sesuai dengan evaluasi dari pihak yang berwenang dengan parameter-parameter pencapaian. Tidak ada keluhan atau teguran dari pihak yang berwenang atau masyarakat

2. *Sasaran Khusus K3*

Sasaran khusus adalah sasaran rinci dari setiap pengendalian risiko yang disusun guna tercapainya Sasaran Umum sesuai dengan tabel Penyusunan Sasaran dan Program K3

3. *Program K3*

Berkaitan dengan kewajiban eksternal, hal yang harus diperhatikan pada saat proyek akan dimulai adalah:

a. Pendaftaran Jamsostek, sesuai dengan UU no. 1 Th 70 maka semua proyek yang mempekerjakan tenaga lebih dari 10 orang wajib melindungi tenaga kerja tersebut melalui ASTEK.
b. Pendaftaran Depnaker, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.01 / MEN/1980, maka Kontraktor wajib melaporkan pekerjaan konstruksi yang akan dilakukan ke Kantor Depnaker setempat.
c. Pendaftaran asuransi lain (bila ada yang diminta sesuai kontrak), misalnya CAR (Contractor All Risk) atau PA (Personal Accident)
d. Ijin dari PU untuk penggunaan jalan/ jembatan yang akan dilalui alat berat.
e. Pemberitahuan kepada Pemerintah/ Daerah / Lingkungan setempat, mengenai banyaknya tenaga kerja pendatang, adanya kendaraan keluar masuk lokasi, adanya pekerjaan di malam hari/lembur.
f. Pengurusan ijin laik pakai untuk alat berat yang memerlukan rekomendasi dari Depnaker atau instansi lain yang berwenang.

TABEL PENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3

Nama Perusahaan : PT. MEGATAMA KARYA
Pekerjaan : PEMBANGUNAN CATUS PATA UNIVERSITAS UDAYANA
Lokasi : Jl. Kampus Unud Bukit Jimbaran
Tanggal dibuat : 16 April 2026

NO	PENGENDALIAN RESIKO	SASARAN		PROGRAM					
		URAIAN	TOLAK UKUR	URAIN KEGIATAN	SUMBER DAYA	JADWAL PELAKSANAAN	BENTUK MONITORING	INDIKATOR PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	**Pekerjaan Struktur**								
	- Penggunaan Alat-alat K3	Menjaga keselamatan Pekerja	Semua personil/pekerja sudah mentaati penggunaan alat-alat K3	Semua pekerja/personil harus menggunakan alat-alat K3 dengan baik	Menyediakan alat dan bahan untuk membuat rambu peringatan Menyediakan alat-alat K3 yang lengkap	Selama pekerjaan berlangsung	Melakukan Checlist	100% Sesuai standard an Taat Melaksanakan sesuai metode kerja	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan, Petugas K3 Konstruksi
	- Bekerja dengan hati-hati	Agar tidak terjadinya kecelakaan	Seluruh pekerja sudah mentaati SOP yang ada	Utamakan keselamatan dalam bekerja	Memberikan pelatihan kerja	Selama pekerjaan berlangsung	Melakukan Checlist	100% Sesuai standard an Taat Melaksanakan sesuai metode kerja	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan, Petugas K3 Konstruksi
	- Memasang perancah dengan baik	Agar tidak terjadinya kecelakaan	Seluruh pekerja sudah mentaati SOP yang ada	Utamakan keselamatan dalam bekerja	Memberikan pelatihan kerja	Selama pekerjaan berlangsung	Melakukan Checlist	100% Sesuai standard an Taat Melaksanakan sesuai metode kerja	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan, Petugas K3 Konstruksi

2. Pekerjaan Arsitektur								
- Penggunaan Alat-alat K3	Menjaga keselamatan Pekerja	Semua personil/pekerja sudah mentaati penggunaan alat-alat K3	Semua pekerja/personil harus menggunakan alat-alat K3 dengan baik	Menyediakan alat dan bahan untuk membuat rambu peringatan Menyediakan alat-alat K3 yang lengkap	Selama pekerjaan berlangsung	Melakukan Checlist	100% Sesuai standard an Taat Melaksanakan sesuai metode kerja	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan, Petugas K3 Konstruksi
- Bekerja dengan hati-hati	Agar tidak terjadinya kecelakaan	Seluruh pekerja sudah mentaati SOP yang ada	Utamakan keselamatan dalam bekerja	Memberikan pelatihan kerja	Selama pekerjaan berlangsung	Melakukan Checlist	100% Sesuai standard an Taat Melaksanakan sesuai metode kerja	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan, Petugas K3 Konstruksi
3. Pekerjaan Patung Catus Pata								
- Penggunaan Alat-alat K3	Menjaga keselamatan Pekerja	Semua personil/pekerja sudah mentaati penggunaan alat-alat K3	Semua pekerja/personil harus menggunakan alat-alat K3 dengan baik	Menyediakan alat dan bahan untuk membuat rambu peringatan Menyediakan alat-alat K3 yang lengkap	Selama pekerjaan berlangsung	Melakukan Checlist	100% Sesuai standard an Taat Melaksanakan sesuai metode kerja	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan, Petugas K3 Konstruksi
- Bekerja dengan hati-hati	Agar tidak terjadinya kecelakaan	Seluruh pekerja sudah mentaati SOP yang ada	Utamakan keselamatan dalam bekerja	Memberikan pelatihan kerja	Selama pekerjaan berlangsung	Melakukan Checlist	100% Sesuai standard an Taat Melaksanakan sesuai metode kerja	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan, Petugas K3 Konstruksi
- Memasang perancah dengan baik	Agar tidak terjadinya kecelakaan	Seluruh pekerja sudah mentaati SOP yang ada	Utamakan keselamatan dalam bekerja	Memberikan pelatihan kerja	Selama pekerjaan berlangsung	Melakukan Checlist	100% Sesuai standard an Taat Melaksanakan sesuai metode kerja	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan, Petugas K3 Konstruksi

4. Pekerjaan Plaza									
-	Penggunaan Alat-alat K3	Menjaga keselamatan Pekerja	Semua personil/pekerja sudah mentaati penggunaan alat-alat K3	Semua pekerja/personil harus menggunakan alat-alat K3 dengan baik	Menyediakan alat dan bahan untuk membuat rambu peringatan Menyediakan alat-alat K3 yang lengkap	Selama pekerjaan berlangsung	Melakukan Checlist	100% Sesuai standard an Taat Melaksanakan sesuai metode kerja	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan, Petugas K3 Konstruksi
-	Bekerja dengan hati-hati	Agar tidak terjadinya kecelakaan	Seluruh pekerja sudah mentaati SOP yang ada	Utamakan keselamatan dalam bekerja	Memberikan pelatihan kerja	Selama pekerjaan berlangsung	Melakukan Checlist	100% Sesuai standard an Taat Melaksanakan sesuai metode kerja	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan, Petugas K3 Konstruksi
5. Pekerjaan Pedestrian									
-	Penggunaan Alat-alat K3	Menjaga keselamatan Pekerja	Semua personil/pekerja sudah mentaati penggunaan alat-alat K3	Semua pekerja/personil harus menggunakan alat-alat K3 dengan baik	Menyediakan alat dan bahan untuk membuat rambu peringatan Menyediakan alat-alat K3 yang lengkap	Selama pekerjaan berlangsung	Melakukan Checlist	100% Sesuai standard an Taat Melaksanakan sesuai metode kerja	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan, Petugas K3 Konstruksi
-	Bekerja dengan hati-hati	Agar tidak terjadinya kecelakaan	Seluruh pekerja sudah mentaati SOP yang ada	Utamakan keselamatan dalam bekerja	Memberikan pelatihan kerja	Selama pekerjaan berlangsung	Melakukan Checlist	100% Sesuai standard an Taat Melaksanakan sesuai metode kerja	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan, Petugas K3 Konstruksi

6.	**Pekerjaan Instalasi Listrik**								
	- Penggunaan Alat-alat K3	Menjaga keselamatan Pekerja	Semua personil/pekerja sudah mentaati penggunaan alat-alat K3	Semua pekerja/personil harus menggunakan alat-alat K3 dengan baik	Menyediakan alat dan bahan untuk membuat rambu peringatan Menyediakan alat-alat K3 yang lengkap	Selama pekerjaan berjaan berlangsung	Melakukan Checlist	100% Sesuai standard an Taat Melaksanakan sesuai metode kerja	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan, Petugas K3 Konstruksi
	- Bekerja dengan hati-hati	Agar tidak terjadinya kecelakaan	Seluruh pekerja sudah mentaati SOP yang ada	Utamakan keselamatan dalam bekerja	Memberikan pelatihan kerja	Selama pekerjaan berlangsung	Melakukan Checlist	100% Sesuai standard an Taat Melaksanakan sesuai metode kerja	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan, Petugas K3 Konstruksi
7.	**Pekerjaan Galian dan Tanah**								
	- Penggunaan Alat-alat K3	Menjaga keselamatan Pekerja	Semua personil/pekerja sudah mentaati penggunaan alat-alat K3	Semua pekerja/personil harus menggunakan alat-alat K3 dengan baik	Menyediakan alat dan bahan untuk membuat rambu peringatan Menyediakan alat-alat K3 yang lengkap	Selama pekerjaan berlangsung	Melakukan Checlist	100% Sesuai standard an Taat Melaksanakan sesuai metode kerja	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan, Petugas K3 Konstruksi
	- Bekerja dengan hati-hati	Agar tidak terjadinya kecelakaan	Seluruh pekerja sudah mentaati SOP yang ada	Utamakan keselamatan dalam bekerja	Memberikan pelatihan kerja	Selama pekerjaan berlangsung	Melakukan Checlist	100% Sesuai standard an Taat Melaksanakan sesuai metode kerja	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan, Petugas K3 Konstruksi

Dibuat oleh,
PT. MEGATAMA KARYA

MEGATAMA karya

Ida Bagus Wayan Mega Antara, ST
Direktur

B.3. STANDAR DAN PERATURAN PERUNDANGAN

Daftar Peraturan Perundang-undangan dan persyaratan K3 yang wajib dimiliki dan dipenuhi dalam melaksankan Pekerjaan ini adalah

a. UUD 45
b. UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
c. UU No. 14/1996 tentang Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja
d. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
e. Peraturan Menteri PU. No. 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehaan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang PU
f. Permenaker No. PER-3/MEN/1998 tentang Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
g. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
h. UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
i. Permenaker No. 186/MEN/2007 tentang Penanggulangan Kebakaran
j. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10* Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

C. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

C.1. Sumber Daya

Berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.05/MEN/1996, yang dimaksud dengan sistem manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya. Sistem manajemen K3 ini dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pecapaian pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna menciptakan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Tujuan dan sasaran sistem manajemen K3 ini adalah menciptakan sistem keselamatan dan kesatuan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Setiap perusahaan yang memperkerjakan lebih dari 100 orang tenaga kerja mempunyai potensi bahaya atau dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja. Oleh karena itu, perusahaan wajib melaksanakan sistem manajemen K3 ini. Sistem manajemen K3 wajib dilaksanakan oleh pengusaha.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pengelolaan sumber daya manusia pada manajemen K3, antara lain:

1. Struktur Organisasi K3
2. Job Description (Wewenang dan Tanggung Jawab)
3. Mekanisme Sistem Organisasi
4. Reward and Punishment (Penghargaan dan Hukuman)
5. *Penjadwalan Penugasan*
6. Key Performance Index (Penilaian Kinerja)

Bagian–bagian yang terlibat langsung dalam manajemen K3 antara lain:

- Manajer, merupakan tingkat tertinggi dari masing-masing divisi yang mengelola dan mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan produktivitas divisinya, khususnya dalam hal penanganan keselamatan dan kesehatan kerja.
- Supervisor, sebagai mengarahkan, membagi, mengawasi dan memberi penilaian setiap pekerjaan yang dibebankan kepada tiap pelaksana.
- Teknisi/Pelaksana, merupakan pekerja level terakhir yang bertugas menjalankan kegiatan untuk menjalankan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan tersebut.

Untuk memenuhi persyaratan K3, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam dalam menyusun uraian jabatan (job description), antara lain:

1. Struktur organisasi.
2. Hasil identifikasi bahaya potensial, penilaian dan pengendalian resiko.
3. Sasaran K3.
4. Persyaratan peraturan dan perundang-undangan.
5. Uraian jabatan yang ada.
6. Catatan kualifikasi personel.

Dalam sistem manajemen K3, terdapat standar umum jabatan, yaitu:

1. Manajemen puncak.
2. Tingkat manajemen pada semua level organisasi.
3. Operator
4. Pengelola rekanan.
5. Bagian HRD.
6. *Penaggung jawab peralatan.*
7. Karyawan yang terkait dengan K3.
8. Karyawan yang ditunjuk sebagai perwakilan K3 dalam asosiasi-asosiasi perusahaan.

C.2. Kompetensi

Dalam penerapan pelaksanaan keselamatan kontruksi di lingkungan kerja dengan mentaati ketentuan dan perundangan K3 termasuk memberikan program pelatihan dan peningkatan kinerja karyawan melalui uji kompetensi terhadap seluruh tenaga kerja sesuai dengan keahlian bidang masing-masing.

STANDARD OF OPERATING PROCEDURE (SOP)

1. TUJUAN
   Memberikan panduan dalam kegiatan peningkatan kompetensi pegawai

2. RUANG LINGKUP
   Prosedur ini dilaksanakan dalam lingkup kegiatan kompetensi pegawai, meliputi: Usulan program peningkatan kompetensi pegawai, Pembentukan tim, Penentuan peserta, Pelaksanaan kegiatan peningkatan Komptensi Karyawan.

3. REFERENSI
   Pedoman Mutu
   Prosedur Penerimaan Karyawan

4. ISTILAH DAN DEFINISI
   Istilah dan definisi yang dipakai dalam penulisan Pedoman Mutu, SOP, Instruksi Kerja serta dokumen lainnya diuraikan secara rinci sesuai SMM ISO 9001:2008, diurutkan berdasarkan abjad dituangkan pada Lampiran Istilah dan Definisi.

5. DIAGRAM ALIR, DOKUMEN DAN KETERANGAN KEGIATAN (Tercantum pada halaman 2/2 *prosedur ini)*

6. FORM
   a. Daftar peserta program peningkatan kompetensi pegawai
   b. Daftar hadir peserta
   c. Jadwal kegiatan
   d. Form evaluasi

7. INSTRUKSI KERJA
   -

8. REKAMAN MUTU
   a. Daftar peserta program peningkatan kompetensi pegawai
   b. Daftar hadir peserta
   c. Jadwal kegiatan
   d. Evaluasi pelaksanaan kegiatan
   e. Definisi dari tanggung jawab dan wewenang masing-masing personel.
   f. Uraian kerja.
   g. Penilaian kinerja personel.
   h. Hasil identifikasi bahaya potensial, penilaian dan pengendalian resiko.
   i. Prosedur dan instruksi kerja.
   j. Kebijakan dan sasaran K3.
   k. Program K3

Untuk memenuhi kompetensi yang telah ditetapkan, terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan, antara lain:

1. On-the-job training (magang).
2. Classroom training (pelatihan).
3. Pembelajaran mandiri.
4. Pendidikan.
5. Konseling (bimbingan).
6. Seminar/menghadiri konferensi.
7. Sebagai observer (pengamat) dalam suatu pekerjaan.
8. Role models (berperan sebagai pelaku pekerjaan).

C.3. Kepedulian

Kepedulian merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan membuat rencana dan program kerja sebagai tindakan pencegahan terhadap risiko kecelakaan kerja, sakit akibat pekerjaan dan pemulihan lingkungan yang tercemar akibat pekerjaan konstruksi. Programkepedulian keselamatan konstruksi sebagai berikut:

C.4. Komunikasi

1. **Tujuan**
   Memberikan pedoman untuk penyebarluasan atau mengkomunikasikan informasiinfomasi lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja kepada pihak internal dan eksternal perusahaan secara efektif.

2. **Ruang Lingkup**
   Prosedur ini berlaku untuk seluruh fasilitas operasi **PT. MEGATAMA KARYA** dan semua pihak yang bekerja di area tersebut. Hal-hal yang diatur dalam prosedur ini adalah cara untuk menyebarluaskan informasi-informasi terkait dengan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan kepada pihak internal maupun eksternal Perusahaan.

3. **Definisi**

Informasi K3, yaitu informasi tentang lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi:

- Peraturan perundangan K3 Indonesia dan Internasional
- Standar Nasional Indonesia dan Internasional
- Kebijakan terpadu dan EHS Management System Manual
- Kondisi bahaya, laporan inspeksi dan laporan & hasil investigasi kecelakaan kerja
- Laporan internal / eksternal audit dan hasil rapat tinjauan ulang manajemen
- Prosedur dan instruksi kerja K3
- Risalah rapat bulanan / khusus P2K3, pelatihan-pelatihan K3

- Tanda-tanda, peringatan bahaya dan tanda / peringatan K3 lainnya
- Dan informasi-informasi lainnya yang terkait denganK3
- Internal Perusahaan, yaitu semua karyawan (karyawan bulanan, harian tetap, harian borongan maupun harian musiman) yang terkait dengan kegiatan operasi
- Eksternal Perusahaan, yaitu semua pihak-pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan operasi, seperti dalam penyediaan pasokan barang/ material maupun jasa (supplier / pemasok barang, kontraktor / sub kontraktor, dll.), termasuk tamu-tamu yang akan berkunjung ke lingkungan operasi maupun penyediaan informasi K3 kepada-kepada instansi-instansi pemerintah yang terkait dan berwenang.
- Konsultasi K3, adalah usaha atau kegiatan untuk mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapai dan peluang untuk perbaikan penerapan, pengembangan dan pemeliharaan sistem manajemen K3

4. **Informasi Telekomunikasi**

➢ **Komunikasi Internal**

a. Diberikan atau mendapat informasi mengenai pedoman dan prosedur Sistem Manajemen Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta pelaksanaannya dilingkungan, melalui kegiatan pelatihan dan pelaksanaannya dikoordinir oleh Technical Training Department.
b. Karyawan mendapatkan informasi mengenai kebijakan terpadu (kualitas, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja), manual SMK3, hasil rapat-rapat P2K3, artikel-artikel
c. K3, perubahanperubahan pada prosedur / instruksi kerja, penyelesaian masalah / keluhan K3, program-program dan kinerja K3. Informasi ini diberikan melalui pelatihan, penjelasan / briefing K3 harian / mingguan atau melalui papan pengumuman dan bulletin K3 (melalui media cetak atau elektronik internal perusahaan).
d. Informasi mengenai peraturan perundangan K3 akan disediakan oleh EHS Manager kepada tiap Kepala Departemen / SMR-Safety Management Representatif / EMR-Environment Management Representatif / SR-Safety Representatif / ER-Environment Representatif Departemen.
e. Laporan hasil kegiatan inspeksi K3, pemantauan lingkungan dan lingkungan
f. *kerja dan penyelidikan kecelakaan disiapkan oleh EHS Department sebagai salah satu* bahan yang akan dibahas dalam rapat bulanan / rapat khusus P2K3, dan dibuatkan risalah rapat P2K3 dan disebarluaskan kepada tiap Kepala Departemen / Safety Management Representatif / Environment Managemen Representatif dan Safety / Environment Representatif serta seluruh anggota P2K3.
g. Hasil laporan audit internal / eksternal SMK3 disiapkan oleh personil EHS Department berdasarkan laporan tim auditor internal / eksternal dan didistribusikan kepada pihak internal (Dewan Direksi, Ketua P2K3, Kepala Divisi, Kepala Departemen / Safety Management Representatif / Environment Management Representatif, Safety Representatif, Environment Representatif) dan pihak eksternal jika diperlukan (misal Auditor Eksternal).
h. Tanda-tanda peringatan K3 (poster, sign, label, dll) disediakan oleh EHS Department dengan terlebih dahulu masing-masing Kepala Departemen melampirkan hasil identifikasi bahaya dan penilaian resiko di departemennya disertai dengan formulir pengajuan permintaan tanda-tanda peringatan K3.
i. Untuk memudahkan penyebaran informasi yang berkaitan dengan K3 dalam lingkup, maka dibuat daftar penyebarluasan informasi K3 (contoh dapat dilihat pada lampiran).

➢ **Komunikasi Eksternal**

a. Personil EHS Department menghubungi instansi-instansi terkait (misal: Kanwil Depnaker / Dinas Depnaker Kabupaten / Kotamadya, Bapedal, Depkes dan sebagainya) untuk mendapatkan informasi terkini mengenai peraturan perundangan berkaitan dengan K3 di Indonesia.
b. Setiap 3 bulan sekali **PT. MEGATAMA KARYA**, melaporkan hasi kegiatan P2K3 kepada Dinas Tenaga Kerja Setempat, dimana laporannya disiapkan oleh sekretaris P2K3 dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris P2K3.
c. Laporan kecelakaan kerja dan hasil penyelidikannya disiapkan oleh EHS Manager dan disampaikan kepada Kepala Operasi, Ketua P2K3 tembusannya kepada pihak Kanwil Depnaker setempat.

d. Pihak pemasok dan kontraktor / sub kontraktor yang terikat kontrak dengan menyediakan barang atau jasa diinformasikan tentang kebijakan dan ketentuan K3. Informasi diberikan oleh Procurement Manager dan bila diperlukan dapat memberikan pelatihan awal atau penjelasan / briefing K3 kepada kontraktor yang akan bekerja di lingkungan
e. Pihak Satuan Pengaman / Security di Pos Komando Keamanan perusahaan berkewajiban memberikan informasi kepada setiap tamu yang akan memasuki area pabrik / plant di lingkungan operasi. Tentang Kebijakan Terpadu (Kualitas, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja), peraturan-peraturan umum K3 dan prosedur menghadapi keadaan darurat.
f. Pihak Satuan Pengaman / Security yang ada di Pos Ronda setiap Gedung / Area Produksi atau Kepala Departemen / Personil Departemen yang ditunjuk berkewajiban memberikan informasi-informasi K3 dan prosedur tanggap darurat yang berlaku di area tersebut kepada setiap tamu yang akan masuk ke gedung / area departemen / plant tersebut.
g. Informasi-informasi yang berkaitan dengan kondisi darurat / emergency yang terjadi di perusahaan diatur dan mengikuti prosedur komunikasi tanggap gawat darurat. Untuk menjamin kerahasiaan semua informasi yang berkaitan dengan K3, diatur dan mengikuti peraturan perusahaan mengenai "Non -Disclosure Agreement"

➢ **Alat dan Media Komunikasi**

Alat dan Media komunikasi yang digunakan dapat berupa dan tidak terbatas hanya pada alat dan media sebagai berikut:

- Electronic mail (e-mail)
- Meeting (townhall, P2K3, dsb.)
- Briefing
- One to one personal contact
- Papan pengumuman
- Pelatihan atau kursus
- Banner, poster (Promosi)
- Distribusi dokumen (Manual, standard procedure, supporting doc, record)
- Telepon, facsimile,

➢ **Konsultasi K3**

- Konsultasi ini bisa dilakukan di internal untuk melibatkan karyawan maupun dengan pihak eksternal, seperti Perguruan Tinggi, Instansi Pemerintah terkait, Lembaga Swadaya masyarakat (NGO – Non Government Organization), perusahaan asuransi, konsultan K3.

- Beberapa contoh konsultasi K3 adalah :
  - o Konsultasi dengan wakil karyawan dalam pembuatan kebijakan K3
  - o Konsultasi dengan karyawan yang ahli maupun dengan pihak eksternal untuk pemenuhan terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lainnya
  - o Konsultasi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga penelitian dalam usaha pencegahan pencemaran lingkungan dan pemanfaatan limbah
  - o Konsultasi dengan pihak konsultan eksternal untuk usaha-usaha peningkatan perilaku dan kinerja karyawan terkait dengan K3.

➢ **Motivasi dan Kesadaran**

Komunikasi dan konsultasi K3 tersebut akan meningkatkan motivasi dan kesadaran semua orang baik karyawan maupun pihak ketiga yang berada di area operasi untuk menerapkan, mengembangkan dan memelihara sistem manajemen K3 untuk memperbaiki kinerja K3 secara menyeluruh.

C.5. Informasi Terdokumentasi

Perusahaan / Penyedia Jasa harus membuat dan memelihara informasi (dokumen) yang berkaitan dengan K3 baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Agar proses dokumentasi dapat berjalan dengan baik, maka perusahaan / penyedia jasa akan menempatkan personil dengan tugas khusus untuk menangani masalah dokumentasi

Dokumen – dokumen disusun sepraktis mungkin sehingga bisa mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam bekerja, khususnya dalam proses pencarian kembali dokumen ataupun dalam peoses penyimpanan dokumen.

No	Jenis Komunikasi	PIC	Waktu Pelaksanaan
1	*Induksi Keselamatan Konstruksi (safety induction)*	*Ahli K3 Konstruksi*	*Selama Pekerjaan Berlangsung, Untuk pekerja baru atau tamu yang baru pertama kali ke lokasi pekerjaan*
2	*Pertemuan pagi hari (safety morning)*	*Ahli K3 Konstruksi*	*Setiap pagi hari sebelum memulai pekerjaan dan selama pekerjaan berlangsung*
3	*Pertemuan kelompok kerja (toolbox meeting)*	*Ahli K3 Konstruksi*	*Setiap akan memulai pekerjaan baru dan selama pekerjaan berlangsung*
4	*Rapat Keselamatan Konstruksi (construction safety meeting)*	*Ahli K3 Konstruksi*	*Setiap 1 Bulan sekali dan selama pekerjaan berlangsung*
5	*HSE Statistic Board*	*Ahli K3 Konstruksi*	*Dari awa mulainya pekerjaan sampai dengan berakhirnya pekerjaan*
6	*Papan Pengumuman Keselamatan Konstruksi*	*Ahli K3 Konstruksi*	*Dari awa mulainya pekerjaan sampai dengan berakhirnya pekerjaan*

D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

D.1. PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN OPERASI

Perencanaan operasional berupa prosedur kerja / petunjuk kerja, yang harus mencakup seluruh upaya pengendalian, diantaranya:

1. Upaya pengendalian berdasarkan lingkup pekerjaan
2. Rencana penunjukan personil yang akan ditugaskan menjadi Penganggung Jawab Kegiatan SMK3
3. Prediksi dan rencana penanganan kondisi keadaan darurat tempat kerja
4. Rencana prosedur / petunjuk kerja yang perlu di siapkan
5. Rencana program pelatihan / soisalisasi sesuai pengendalian resiko
6. Sistem pertolongan pertama pada kecelakaan
7. Persyaratan Operator Alat Angkat
    a. Operator Alat Angkat harus memenuhi kompetensi
    b. Setiap Operator alat angkat harus memiliki SIO (Surat Izin Operasi) atau bersertifikat yang di keluarkan oleh Badan yang berwenang
8. Rambu Peringatan / Larangan / Anjuran
    a. Penempatan Rambu-rambu peringatan/larangan/anjuran harus dipasang sesuai dengan kondisi di tempat kerja
    b. Rambu peringatan/larangan/anjuran harus mudah dilihat dan dapat dibaca
9. Alat Pelindung Diri
    a. Alat pelindung diri diidentifikasi berdasarkan hasil penilaian risiko
    b. Alat pelindung diri (APD) diberikan kepada pekerja sesuai dengan jenis pekerjaan
10. Tamu/pengunjung dan pihak luar
    a. Pengendalian dan pembatasan akses masuk dan akses keluar tempat kerja
    b. Persyaratan APD (Alat Pelindung Diri)
    c. Induksi K3
    d. Prosedur dan Persyaratan tanggap darurat

a. Alat pelindung diri diidentifikasi berdasarkan hasil penilaian risiko
b. Alat pelindung diri (APD) diberikan kepada pekerja sesuai dengan jenis pekerjaan

10. Tamu/pengunjung dan pihak luar
    a. Pengendalian dan pembatasan akses masuk dan akses keluar tempat kerja
    b. Persyaratan APD (Alat Pelindung Diri)
    c. Induksi K3
    d. Prosedur dan Persyaratan tanggap darurat

D.2. KESIAPAN DAN TANGGAPAN TERHADAP KONDISI DARURAT

D.2.1. Daftar Induk Prosedur dan/atau Instruksi Kerja

Memuat daftar induk prosedur dan/atau instruksi kerja yang ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi /Wakil Manajemen. Seluruh pekerjaan konstruksi dan penerapan SMKK pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus memiliki prosedur dan/atau petunjuk kerja yang telah ditandatangani.

D.2.2. Kesiap-siagaan dan Tanggap Terhadap Kondisi Darurat

a. Prosedur dan/atau petunjuk kerja tanggap darurat Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja tanggap darurat sesuai dengan sifat dan klasifikasi Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan yang ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.

b. Prosedur dan/atau petunjuk kerja penyelidikan insiden Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja penyelidikan insiden (kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan dan Konstruksi Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.

D.1.3 Analisis Keselamatan Pekerjaan (*Job Safety Analysis*)

Keterangan: Uraian langkah kerja tidak lebih dari 10 item
Dalam hal peninjauan kondisi dan tindakan harus melihat, mempertimbangkan unsur-unsur yang terkait bahan/material, orang, cara/metode/prosedur, alat, lingkungan.

Analisis Keselamatan Pekerjaan (*Job Safety Analysis*)

Nama Pekerja	:	Ida Ayu Putu Sri Mahapatni, ST., MT
Nama Paket Pekerjaan	:	Pembangunan Catus Pata Universitas Udayana
Tanggal Pekerjaan	:	16 April 2026

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan:

√	Helm/Safety Helmet	√	Rompi Keselamatan/Safety Vest Pelindung di ketinggian/Full	√	Telinga/Ear Mufs Penyumbat
√	Sepatu/Safety Shoes	√	Body Harness Kacamata Pengaman/Safety Glasses		
√	Sarung Tangan/Safety Gloves	√	Baju kerja Las/Appron		
√	Masker Pernafasan/Respiratory	√	Pelindung Wajah/Face Shield Penutup		

No	Urutan Langkah Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Pengendalian	Penanggung Jawab
1	Pekerjaan Struktur	- Kecelakaan pada saat Bekerja	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
		- Terjatuh dari ketinggian	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati - Memasang perancah dengan baik	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
		- Tertimpa alat berat	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
		- Tertimpa balok beton	- Menggunakan APD lengkap	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi

			- Bekerja dengan hati-hati	
		- Terkena Benda Tajam	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
		- Mata terkena Debu	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
		- Terpleset	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
		- Terluka kena benda kerja	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
2	Pekerjaan Arsitektur	- Kecelakaan pada saat Bekerja	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
		- Terjatuh	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
		- Tertimpa alat kerja	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
		- Terkena Benda Tajam	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
		- Mata terkena Debu	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
		- Terpleset	- Menggunakan APD lengkap	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi

			- Bekerja dengan hati-hati	
		- Terluka kena benda kerja	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
		- Terhirup debu	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
3	Pekerjaan Patung Catus Pata	- Kecelakaan pada saat Bekerja	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
		- Terjatuh dari ketinggian	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati - Memasang perancah dengan baik	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
		- Tertimpa alat berat	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
		- Tertimpa balok beton	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
		- Terkena Benda Tajam	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
		- Mata terkena Debu	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
		- Terpleset	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi

		- Terluka kena benda kerja	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
4	Pekerjaan Plaza	- Kecelakaan pada saat bekerja	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
		- Terluka kena mesin potong	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
		- Tersengat listrik	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
		- Terkena benda kerja	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
		- Mata terkena debu	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
		- Sesak nafas terhirup debu	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
5	Pekerjaan Pedestrian	- Kecelakaan pada saat Bekerja	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
		- Terluka kena mesin potong	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
		- Tersengat listrik	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi

		- Terkena Benda kerja	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
		- Mata terkena Debu	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
		- Sesak nafas terhirup Debu	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
6	Pekerjaan Instalasi Listrik	- Kecelakaan pada saat Bekerja	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
		- Tersengat listrik	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
		- Tertimpa alat kerja	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
		- Terkena benda tajam	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
		- Mata terkena Debu	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
		- Terjatuh	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi
		- Terluka kena benda kerja	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati	Pimpinan Teknis, Pelaksana Lapangan,Petugas Keselamatan Konstruksi

7	Pekerjaan Galian dan Tanah	- Kecelakaan pada saat Bekerja	- Terluka kena benda kerja	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati
		- Terperosok	- Terluka kena benda kerja	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati
		- Tertimpa alat kerja.	- Terluka kena benda kerja	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati
		- Terjepit alat berat	- Terluka kena benda kerja	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati
		- Mata terkena debu	- Terluka kena benda kerja	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati
		- Terluka kena benda kerja	- Terluka kena benda kerja	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati
		- Tertimbun bahan galian	- Terluka kena benda kerja	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati
		- Terserempet dump truk	- Terluka kena benda kerja	- Menggunakan APD lengkap - Bekerja dengan hati-hati

E. EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI

E.1. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pengendalian pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan mengacu pada kegiatan yang dilaksanakan pada bagian D (Operasi keselamatan konstruksi) berdasarkan upaya pengendalian pada bagian B (Perencanaan keselamatan konstruksi) dan C (Dukungan keselamatan konstuksi). Hal-hal yang harus dilaporkan dalam laporan evaluasi dan kinerja K3 adalah:

- Rekapitulasi kecelakaan kerja dengan mengacu pada pelaporan dan penyelidikan kecelakaan yang sudah dibuat.
- Occupational Injury/Illness (Cidera/Sakit Akibat Kerja)
- Fatality (Meninggal Dunia)
- Loss Work Day / Loss Time Injury (Hilang Hari Kerja)
- Restricted Work Day (Kerja Terbatas)
- Medical Treatment (Perawatan Kesehatan)
- First Aid (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)
  →Fire Accident (Kebakaran)
  → Traffic Accident (Kecelakaan lalu lintas)
  → Environmental Accident (Kecelakaan Lingkungan)
  → Property Damage Accident (Kecelakaan peralatan atau mesin)
  Near miss (Hampir celaka)
  → Man Hour (Jam kerja)
  → Km Driven (Kilometer mengemudi – untuk kendaraan perusahaan)

E.1.1. Inspeksi Audit

a. Inspeksi

- Prosedur dan/atau petunjuk kerja inspeksi

  Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja inspeksi yang ditandatangani oleh ahli teknik terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen.

- Lembar Periksa

  Memuat format lembar periksa lingkup pekerjaan, pesawat angkat & angkut (alat berat), perkakas, bahan/material, lingkungan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Lembar periksa ditandatangani pada satu periode waktu tertentu (harian, mingguan, bulanan). Inspeksi terdiri dari berbagai macam bentuk lembar periksa sekurang-kurangnya mencakup:

  - Lingkup pekerjaan ditandatangani oleh ahli teknik terkait, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
  - Pesawat angkat & angkut (alat berat) ditandatangani oleh ahli teknik terkait, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
  - Perkakas ditandatangani oleh ahli teknik terkait, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
  - Bahan/material ditandatangani oleh ahli teknik terkait, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.
  - Lingkungan (housekeeping, pencemaran, hygine) ditandatangani oleh ahli terkait, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
  - Kesehatan ditandatangani oleh ahli terkait, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
  - Keamanan/security ditandatangani oleh ahli terkait, Penanggung Jawab

Keselamatan Konstruksi.

- Lembar Penghentian Pekerjaan (Stop Working Form)
  - Apabila pada saat pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ditemukan hal yang membahayakan setiap personil dapat menyerukan untuk menghentikan pekerjaan. Pimpinan Tertinggi Penyedia Jasa memberikan kewenangan kepada Pimpinan Unit Keselamatan Konstruksi dan/atau Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi untuk melakukan verifikasi penghentian pekerjaan. Dalam melakukan verifikasi pihak berwenang mengisi lembar penghentian pekerjaan ditandatangani oleh pihak-pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Tertinggi Penyedia Jasa.

b. Patroli Keselamatan Konstruksi

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja Patroli Keselamatan Konstruksi yang disusun oleh Penyedia Jasa ditandatangani oleh ahli terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen. Patroli Keselamatan Konstruksi dilakukan oleh seluruh Pimpinan Perusahaan (Penyedia Jasa, Pengawas Pekerjaan, Sub Kontraktor) dan Pengguna Jasa.

c. Audit

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja audit internal yang ditandatangani oleh ahli terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen. Audit internal dilakukan danditetapkan secara berkala oleh Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dengan melibatkan auditor independen. Audit internal dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan/atau untuk pekerjaan konstruksi tahun jamak mengikuti peraturan perundangan yang berlaku

d. *Jadwal Inspeksi dan Audit*

Memuat jadwal pelaksanaan inspeksi, patrol keselamatan konstruksi dan audit.

No	Kegiatan	PIC	Bulan Ke-							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Inspeksi Keselamatan Konstruksi*	*Petugas Keselamatan Konstruksi*	√	√	√	√	√	√	√	√
2	*Patroli Keselamatan Konstruksi*	*Petugas Keselamatan Konstruksi*	√	√	√	√	√	√	√	√
3	*Audit internal*	*Petugas Keselamatan Konstruksi*	√	√	√	√	√	√	√	√

E.2. TINJAUAN MANAJEMEN

Hasil pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 pada bagian E. Diklasifikasikan dengan kategori sesuai dan tidak sesuai tolak ukur sebagaimana dalam Perencananaan Keselamatan Konstruksi Hal-hal yang tidak sesuai, termasuk bilamana terjadi kecelakaan kerja dilakukan peningjauan ulang untuk di ambil tindakan perbaikan.

E.3. PENINGKATAN KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI

Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi dilakukan dengan melakukan pemantauan, pengawasan, pelatihan dan pembahasan rapat SMK3 secara periodik serta dengan melaksanakan audit secara menyeluruh dimulai pada tahap pelaksanaan serta penyelesaian proyek.

Demikian Penyusunan Rencana Keselamatan Konstruksi **PT. MEGATAMA KARYA,** disusun sebagai petunjuk dalam Pekerjaan **Pembangunan Catus Pata Universitas Udayana.** MANAJEMEN Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) akan terus diperbarui demi efektivitas pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi secara berkesinambungan.

Denpasar, 16 April 2026
PT. MEGATAMA KARYA

Ida Bagus Wayan Mega Antara, ST
Direktur

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.

1.1 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

1.2 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakan** adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaanya diserahkan kepada Penyedia lain (subpenyedia) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pengguna Jasa.

1.3 **Daftar Kuantitas dan Harga** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.

1.4 **Direksi Lapangan** adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pengguna Jasa, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

1.5 **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.

1.6 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa.

1.7 **Harga Satuan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.

1.8 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.

1.9 **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

1.10 **Kegagalan Bangunan** adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.

1.11 **Kerja Sama Operasi** yang selanjutnya disingkat **KSO** adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak,

kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

1.12 **Kontrak Kerja Konstruksi** selanjutnya disebut **Kontrak** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.

1.13 **Kontrak Harga Satuan** adalah Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaanya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

1.14 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

1.15 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah

1.16 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

1.17 **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.

1.18 **Masa Pemeliharaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

1.19 **Mata Pembayaran Utama** adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.

1.20 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.

1.21 **Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan** yang

selanjutnya disingkat **PPHP** adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

1.22 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

1.23 **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

1.24 **Pekerjaan Utama** adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam rancangan kontrak.

1.25 **Pelaku Usaha** adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

1.26 **Pengawas Pekerjaan** adalah tim pendukung/badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pengguna Jasa yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

1.27 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.

1.28 **Pengguna Jasa** adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau Pejabat Pembuat Komitmen.

1.29 **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.

1.30 **Personel Manajerial** adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.

1.31 **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.

1.32 **Subpenyedia** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan

Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

1.33 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia/Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

1.34 **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat **SPMK** adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.

1.35 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada **SPMK** yang diterbitkan oleh Pengguna Jasa untuk memulai melaksanakan pekerjaan.

1.36 **Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan** adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (Provisional Hand Over/PHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pengguna Jasa.

1.37 **Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan** adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (Final Hand Over/FHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pengguna Jasa.

1.38 **Tenaga Kerja Konstruksi** adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.

2. **Penerapan**

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam *Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi* berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. **Bahasa dan Hukum**

3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.

3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.

3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. **Korespondensi**

4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.

4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili

jdih.pu.go.id

ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

5. **Wakil Sah Para Pihak**

5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pengguna Jasa atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak.

5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.

5.3 Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pengguna Jasa, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pengguna Jasa.

6. **Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan**

6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :

a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subpenyedianya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.

6.3 Penyedia yang menurut penilaian Pengguna Jasa terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pengguna Jasa sebagai berikut:

a. pemutusan Kontrak;
b. *Jaminan Pelaksanaan* dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam.

[catatan: pengenaan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK.
PA/KPA menyampaikan dokumen penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada:

jdih.pu.go.id

1) Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam; dan
2) unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional]

6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pengguna Jasa kepada PA/KPA.

6.5 *Pengguna Jasa yang terlibat dalam* KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Asal Material/Bahan

7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Jasa.

7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

7.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

8. Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

9. Perpajakan

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.

10. Pengalihan Seluruh Kontrak

10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.

10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh Pengguna Jasa dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.2.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruki dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. KSO

KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas

jdih.pu.go.id

nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pengguna Jasa berdasarkan Kontrak ini.

14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

14.1 Pengguna Jasa menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel Pengguna Jasa (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).

14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel Pengguna Jasa dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pengguna Jasa.

15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan

15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari Pengguna Jasa.

15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (no objection) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.

15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:

a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
b. memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
c. memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
d. memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
e. menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
f. bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
g. memberikan laporan secara periodik kepada Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

15.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari

jdih.pu.go.id

Pengguna Jasa.

15.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

16. Penemuan-penemuan

Penyedia wajib memberitahukan kepada Pengguna Jasa dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

17. Akses ke Lokasi Kerja

17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pengguna Jasa, Wakil Sah Pengguna Jasa, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pengguna Jasa ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka:

a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat pengunaan jalur akses;

b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;

c. biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan

d. Pengguna Jasa tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.

17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (overhead) dalam Penawaran Penyedia, maka Pengguna Jasa dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.

17.4 Pengguna Jasa tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

18. Masa Kontrak

Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatangananan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

19. Penyerahan Lokasi Kerja

19.1 *Sebelum* penyerahan lokasi kerja, dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.

19.2 Pengguna Jasa berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam

jdih.pu.go.id

rencana penyerahan lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatangananan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.

19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.

19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum kontrak.

19.5 Jika Pengguna Jasa tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pengguna Jasa, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

20. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

20.1 Pengguna Jasa menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatangananan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.

20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.

21. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)

21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pengguna Jasa .

21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:

a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Work Method Statement);
b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/ Inspection and Test Plan (ITP);
c. Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok.

21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.

21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.

21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.

21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan Pengguna Jasa .

21.7 Persetujuan Pengguna Jasa terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.

jdih.pu.go.id

22. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pengguna Jasa.
	22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.
	22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
	22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam adendum Kontrak.
	22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pengguna Jasa.
	22.6 Persetujuan Pengguna Jasa terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak	23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pengguna Jasa bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
	23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi: a. Penerapan SMKK: 1) RKK; 2) RMPK; 3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) (apabila ada); dan 4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada); b. Rencana Kerja; c. organisasi kerja; d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan; e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi; dan f. hal-hal lain yang dianggap perlu.
	23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
	23.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
24. Mobilisasi	24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai

jdih.pu.go.id

kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :

a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;

b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau

c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.

24.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

24.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

25. Pengukuran / Pemeriksaan Bersama

25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pengguna Jasa dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%).

25.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

25.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.

26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri

26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.

26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:

a. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan

b. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.

26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B.2 Pengendalian Waktu

27. Masa Pelaksanaan

27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai

jdih.pu.go.id

dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.

27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pengguna Jasa, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pengguna Jasa, maka Pengguna Jasa dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum Kontrak.

27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.

27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.

27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

28. Penundaan Oleh Pegawas Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.

29. Rapat Pemantauan

29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.

29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pengguna Jasa dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.

29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

30. Peringatan Dini

30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.

jdih.pu.go.id

30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

31. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis

31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pengguna Jasa harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.

31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:

a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%

b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;

c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

31.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM)

a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengguna Jasa berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pengguna Jasa menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.

b. Dalam SCM Tahap I, Pengguna Jasa, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.

c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pengguna Jasa menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.

d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pengguna Jasa menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.

e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga,

jdih.pu.go.id

maka Pengguna Jasa menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pengguna Jasa dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

32. Pemberian Kesempatan

32.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pengguna Jasa menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pengguna Jasa dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk *menyelesaikan pekerjaan.*

32.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya mengatur:

a. waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;

b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;

c. perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan

d. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak Masa Pelaksanaan berakhir.

32.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

B.3 Penyelesaian Kontrak

33. Serah Terima Pekerjaan

33.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Jasa untuk serah terima pertama pekerjaan.

33.2 Pengguna Jasa memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.

33.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.

33.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pengguna Jasa, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pengguna Jasa memerintahkan

jdih.pu.go.id

Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

33.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pengguna Jasa dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.

33.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

33.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

33.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.

33.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Jasa untuk penyerahan akhir pekerjaan.

33.10 Pengguna Jasa setelah menerima pegajuan sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.

33.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pengguna Jasa dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.

33.12 Pengguna Jasa wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

33.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pengguna Jasa dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.3.

33.14 Setelah penandatangananan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pengguna Jasa menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

33.15 PA/KPA meminta PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserahterimakan.

33.16 PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak

jdih.pu.go.id

perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan Pengguna Jasa, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan.

33.17 Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PPHP melalui PA/KPA memerintahkan Pengguna Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif.

33.18 Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara.

33.19 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.

33.20 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:

a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan

b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.

33.21 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.

33.22 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

33.23 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.

34. Pengambilalihan

Pengguna Jasa akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

35. Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan

35.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pengguna Jasa Gambar As-built dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.

35.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pengguna Jasa berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.4 Adendum

36. Perubahan Kontrak

36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.

36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan

jdih.pu.go.id

beberapa hal berikut meliputi:

a. perubahan pekerjaan;
b. perubahan Harga Kontrak;
c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
d. perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau
e. perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.

36.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pengguna Jasa dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

36.4 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak

37. Perubahan Pekerjaan

37.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pengguna Jasa bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

37.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada perintah perubahan dari Pengguna Jasa, Pengguna Jasa bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:

a. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pengguna Jasa secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.

37.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.

38. Perubahan Harga

38.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:

jdih.pu.go.id

a. perubahan pekerjaan;
b. penyesuaian harga; dan/atau
c. Peristiwa Kompensasi.

38.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.

38.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.

38.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.

38.5 Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada PPK. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi.

38.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:

a) harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
c) penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
d) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
e) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
f) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
g) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
h) *indeks yang digunakan dalam pelaksanaan* Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi

jdih.pu.go.id

pekerjaan;

i) jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.

38.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.

38.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.

39. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan

39.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:

a. perubahan pekerjaan;

b. perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau

c. Peristiwa Kompensasi.

39.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pengguna Jasa atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

a. perubahan pekerjaan;

b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau

c. Keadaan Kahar.

39.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau b.

39.4 Pengguna Jasa dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.

39.5 Pengguna Jasa berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.

39.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.

39.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pengguna Jasa berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.

40. Perubahan personel

40.1 Jika Pengguna Jasa menilai bahwa Personel

jdih.pu.go.id

manajerial dan/atau peralatan utama

Manajerial :
1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
2. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pengguna Jasa

40.2 Jika Pengguna Jasa menilai bahwa Peralatan Utama :
1. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau
2. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pengguna Jasa

40.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

40.4 Pengguna Jasa dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.

40.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Jasa dan dituangkan dalam adendum kontrak.

40.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung jawab Penyedia.

B.5 Keadaan Kahar

41. Keadaan Kahar

41.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.

41.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

41.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pengguna Jasa atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :

a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar

jdih.pu.go.id

b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.

41.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :

a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.

41.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:

a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
b. Kurva S pekerjaan; dan
c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).

41.6 Pengguna Jasa meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahardan dan bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan pasal 41.5

41.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

41.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat

a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
c. sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; *dan/atau*
d. seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan;

41.9 Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh Pengguna Jasa dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja Penyedia

41.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka:

jdih.pu.go.id

a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

41.11 Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pengguna Jasa dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam adendum kontrak.

41.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.

41.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pengguna Jasa memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

41.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran kontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak

42. Penghentian Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.

43. Pemutusan Kontrak

43.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pengguna Jasa atau Penyedia.

43.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.

43.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan

43.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pengguna Jasa/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pengguna Jasa.

43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pengguna Jasa

jdih.pu.go.id

membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pengguna Jasa dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pengguna Jasa dan selanjutnya menjadi hak milik Pengguna Jasa.

44. Pemutusan Kontrak oleh Pengguna Jasa

44.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengguna Jasa dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;

b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;

c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;

d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;

e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja;

f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;

g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

h. berdasarkan penelitian Pengguna Jasa, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau

k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.

44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:

a. Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;

b. sisa uang muka harus dilunasi oleh

jdih.pu.go.id

Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);

c. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan

d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam

44.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:

a. Pengguna Jasa berhak untuk tidak membayar retensi atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan Kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan

b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

44.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pengguna Jasa wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

44.5 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:

a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan

b. dokumen pendukung.

44.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK

45. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

a. Pengguna Jasa menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;

b. Pengguna Jasa tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

46. Pengakhiran Pekerjaan

46.1 Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran pekerjaan dalam hal terjadi:

a. penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;

b. pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau

c. ruang lingkup kontrak sudah terwujud.

46.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 dituangkan dalam addendum final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak.

47. Berakhirnya Kontrak

47.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

47.2 Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

jdih.pu.go.id

47.3 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

48. Peninggalan

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pengguna Jasa tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pengguna Jasa.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

49. Hak dan Kewajiban Penyedia

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pengguna Jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Jasa;

d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Jasa;

g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;

h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;

i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

50. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pengguna Jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.pu.go.id

51. Hak Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi Pengguna Jasa dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.

52. Penanggungan Risiko

52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pengguna Jasa beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pengguna Jasa beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pengguna Jasa) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pengguna Jasa.

52.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungan asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.

52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

53. Perlindungan Tenaga Kerja

53.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

53.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan

jdih.pu.go.id

memahami peraturan keselamatan konstruksi kerja tersebut.

53.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

53.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pengguna Jasa mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

54. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

55. Asuransi

55.1 Apabila disyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap:

a. terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas:
   i. segala risiko terhadap kecelakaan;
   ii. kerusakan akibat kecelakaan.
b. *kehilangan; dan/atau*
c. serta risiko lain yang tidak dapat diduga.

55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.

55.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.

56. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengguna Jasa atau Pengawas Pekerjaan

56.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengguna Jasa sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam Lampiran A SSKK;
b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
c. mengubah atau memutakhirkan dokumen penerapan SMKK;
d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.

56.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode

jdih.pu.go.id

kerja;

b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;

c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;

d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.

56.3 Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK

57. Laporan Hasil Pekerjaan

57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

57.3 Laporan harian berisi:

a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;

b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya;

c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;

d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan

f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.

57.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

57.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

57.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.

57.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pengguna Jasa/pihak Pengguna Jasa.

58. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pengguna Jasa. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau

jdih.pu.go.id

penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pengguna Jasa. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

59. Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia

59.1 Penyedia hanya boleh melakukan subkontrak sebagian:

a. pekerjaan utama kepada Penyedia Spesialis; dan/atau
b. pekerjaan bukan pekerjaan utama kepada Penyedia Usaha Kecil.

59.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

59.3 Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.

59.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.

59.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subpenyedia hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.

59.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pengguna Jasa dan dituangkan dalam adendum Kontrak.

59.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pengguna Jasa.

59.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau 59.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

60. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pengguna Jasa dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.

61. Alih Pengalaman/Keahlian

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia.

62. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pengguna Jasa mengenakan denda

jdih.pu.go.id

dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

63. Jaminan

63.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau surety bond. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pengguna Jasa atau pihak yang diberi kuasa oleh Pengguna Jasa diterima.

63.2 Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

63.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:

a. paket pekerjaan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:
   1) Bank Umum;
   2) Perusahaan Asuransi;
   3) Perusahaan Penjaminan;
   4) lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau
   5) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship).

b. paket pekerjaan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:
   1) Bank Umum; atau
   2) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship).

63.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pengguna Jasa setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:

a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
b. 5% (lima persen) dari nilai total HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai total HPS.

63.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand

jdih.pu.go.id

Over/PHO).

63.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;

63.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pengguna Jasa dalam rangka pengambilan uang muka yang besarannya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.

63.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

63.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).

63.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pengguna Jasa setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).

63.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.

63.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA JASA

64. Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengguna Jasa dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.

d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan

f. menilai kinerja Penyedia.

65. Fasilitas

Pengguna Jasa dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan ini.

66. Peristiwa Kompensasi

66.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:

a. Pengguna Jasa mengubah jadwal pekerjaan

jdih.pu.go.id

yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
c. Pengguna Jasa tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
e. Pengguna Jasa menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
f. Pengguna Jasa memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
g. Pengguna Jasa memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pengguna Jasa; atau
h. ketentuan lain dalam SSKK.

66.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pengguna Jasa berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.

66.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa, dapat dibuktikan kerugian nyata.

66.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

66.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

67. Tenaga Kerja Konstruksi

67.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.

67.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.

68. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama

68.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.

68.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan

jdih.pu.go.id

yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.

68.3 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pengguna Jasa, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

69. Harga Kontrak

69.1 Pengguna Jasa membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.

69.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :

a. beban pajak;
b. keuntungan dan biaya overhead (biaya umum);
c. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
d. biaya penerapan SMKK.

69.3 Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

69.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

70. Pembayaran

70.1 Uang Muka

a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.
b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Harga Kontrak.
c. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.
d. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Kontrak.
e. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
f. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pengguna Jasa disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.
g. Pengguna Jasa harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangananan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.

jdih.pu.go.id

h. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

70.2 Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna Jasa, dengan ketentuan:

a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pengguna Jasa;

c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;

d. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK;

e. pembayaran harus memperhitungkan:
   1) angsuran uang muka;
   2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan (material on site) yang sudah dibayar sebelumnya;
   3) denda (apabila ada);
   4) pajak; dan/atau
   5) uang retensi.

f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subpenyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pengguna Jasa;

g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pengguna Jasa dan Penyedia;

h. Pengguna Jasa dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);

i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pengguna Jasa dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

70.3 Material on Site

jdih.pu.go.id

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:

a. bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan
b. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (commisioning), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   (1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
   (2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
   (3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
   (4) disetujui oleh Pengguna Jasa sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
   (5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan oleh pihak manapun; dan
   (6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.
c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
d. besaran yang akan dibayarkan dari *material on site* (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP);
e. besaran nilai pembayaran dan jenis material on site dicantumkan di dalam SSKK.

70.4 Denda dan Ganti Rugi

a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pengguna Jasa maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
   1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
   2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);

jdih.pu.go.id

sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.

d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.
e. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan.
f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pengguna Jasa atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.
h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam adendum kontrak.
i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

71. Hari Kerja

71.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.

71.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:

a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
b. Pengguna Jasa memberikan izin; atau
c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan Pengguna Jasa.

71.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh PPK.

71.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.

71.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.

72. Perhitungan Akhir

72.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.

72.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan,

jdih.pu.go.id

Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pengguna Jasa berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

73. Penangguhan

73.1 Pengguna Jasa dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

73.2 Pengguna Jasa secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

73.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.

73.4 Jika dipandang perlu oleh Pengguna Jasa, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

G. PENGAWASAN MUTU

74. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pengguna Jasa berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pengguna Jasa dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

75. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pengguna Jasa

75.1 Pengguna Jasa dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.

75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

76. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu

76.1 Pengguna Jasa atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas *setiap Cacat Mutu yang ditemukan*. Pengguna Jasa atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu , serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pengguna Jasa atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu . Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.

76.2 Jika Pengguna Jasa atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil

uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi

77. Perbaikan Cacat Mutu

77.1 Pengguna Jasa atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.

77.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

77.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pengguna Jasa, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pengguna Jasa secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pengguna Jasa dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pengguna Jasa yang telah jatuh tempo.

77.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pengguna Jasa selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pengguna Jasa tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.

77.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh pengguna jasa selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

77.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.

77.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pengguna Jasa.

77.8 Pengguna Jasa dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan.

78. Kegagalan Bangunan

78.1 Kegagalan Bangunan terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan

78.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang

jdih.pu.go.id

tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.

78.3 Pengguna Jasa bertanggungjawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.

78.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pengguna Jasa beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pengguna Jasa beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pengguna Jasa) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari Kegagalan Bangunan.

78.5 Pengguna Jasa maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

79. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa

79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

79.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

79.3 Selain ketentuan pada pasal 79.2 para pihak dapat membentuk dewan sengketa (untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi)

79.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan kontrak.

80. Itikad Baik

80.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.

80.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

jdih.pu.go.id

jdih.pu.go.id